

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mendapatkan julukan “*global marine biodiversity*” yang berarti bahwa, Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat beranekaragam (Robert et. al dalam Hasani, 2012). Pesisir Indonesia merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya dan sangat potensial baik secara ekonomi, ekologi, pendidikan dan penelitian. Potensial secara ekonomi bahwa sumber daya pesisir dapat dimanfaatkan sebagai produksi perikanan, wisata bahari, pertambangan, energi, daerah perhubungan laut, serta industri maritim. Potensial secara ekologi dapat dilihat dari adanya ekosistem terumbu karang ataupun mangrove. Kemudian potensial untuk dijadikan sebagai sarana pendidikan dan juga penelitian untuk menunjang pembangunan berkelanjutan untuk wilayah pesisir.

Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil, menjelaskan bahwa wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Ekosistem darat meliputi bagian yang dipengaruhi sifat – sifat laut, seperti pasang surut, angin laut, perembesan air asin. Sedangkan ekosistem laut, mencakup bagian laut yang dipengaruhi oleh proses – proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi, aliran air tawar, maupun kegiatan lain yang disebabkan manusia (Hadi dalam Kismartini dan Bungin, 2019).

Pesisir merupakan wilayah yang memiliki kompleksitas yang tinggi, merupakan wilayah yang sangat potensial dan juga wilayah yang sangat rentan. Wilayah pesisir mudah berubah dalam skala temporal maupun spasial (Kismartini dan Bungin, 2019). Perubahan yang terjadi pada wilayah pesisir diakibatkan oleh beberapa hal seperti adanya kegiatan industri, wisata, pelabuhan, pertanian, budidaya tambak, dan lain – lain. Selain itu, perubahan wilayah pesisir juga disebabkan karena faktor alam atau letak geografis pesisir yang dekat dengan laut sehingga rentan terhadap abrasi dan rob. Hasil penelitian Marfai dan Suryanti (2012) yang berjudul “Analisis Multibahaya di Wilayah Pesisir Kabupaten Demak” menjelaskan bahwa abrasi dan rob di daerah pesisir Kabupaten Demak terjadi pada daerah yang padat industry. Berdasarkan data dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Demak tahun 2010 telah terjadi perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri atau non pertanian sebesar 567.864 m² dan terus meningkat setiap tahunnya. Akibatnya, sebesar 57% wilayah di Kabupaten Demak masuk pada kategori wilayah bahaya abrasi dan rob.

Hasil penelitian yang berjudul “*Hard Habit to Break: Investigating Coastal Resources Utilization and Management System in Sulawesi Indonesia*”, oleh Idrus, dalam Kismartini dan Bungin (2019) dijelaskan bahwa Indonesia memiliki kawasan pesisir dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, tetapi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir masih berada dibawah garis kemiskinan. Hal tersebut terjadi karena ketidakmampuan institusi formal untuk mengelola potensi yang dimiliki secara efektif untuk kemakmuran rakyat melalui kebijakan yang diambil. Setiap *stakeholder* dalam pengelolaan pesisir masih berorientasi pada kepentingan

masing – masing, sehingga membuat permasalahan di daerah pesisir semakin kompleks.

Salah satu kawasan pesisir yang sempat menjadi sorotan pada pertengahan tahun 2019 adalah kawasan pesisir Tambaklorok yang berlokasi di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dimana kawasan pesisir tersebut pernah mendapatkan kunjungan pribadi oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada tahun 2014, dan sempat disinggung dalam debat Calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019.

Pada debat Calon Presiden 2019, Bapak Jokowi menanggapi pertanyaan Calon Presiden nomor urut 2 terkait kondisi nelayan di Indonesia yang masih kurang sejahtera, kemudian beliau menyatakan bahwa dirinya sering berkunjung ke beberapa daerah pesisir, bahkan pernah hanya berdua dengan sopirnya tanpa pengawalan ke kawasan pesisir Tambaklorok untuk mengetahui kondisi nelayan serta masyarakat, kondisi perekonomian, dan juga mengenai proyek pembangunan Kampung Bahari yang telah beliau instruksikan sejak tahun 2014 (portal berita detikNews, Selasa, 9 Februari 2019).

Secara administratif, kawasan pesisir Tambaklorok terbagi menjadi dua kawasan, yaitu kawasan Tambak Mulyo disebelah barat serta Tambak Rejo disebelah timur. Karakteristik permukiman di pesisir Tambaklorok menunjukkan kepadatan bangunan yang tinggi, infrastruktur yang kurang memadai, sistem drainase yang masih buruk, masalah limbah rumah tangga, serta belum adanya pengelolaan sampah yang baik. Hal tersebut berdampak pada munculnya

permukiman kumuh di kawasan pesisir Tambaklorok (Dokumen RTBL Tambaklorok, 2016).

Secara garis besar, terdapat empat permasalahan utama di kawasan pesisir Tambaklorok, yaitu: (1) kawasan dengan tingkat *landsubsidence* yang tinggi; (2) kawasan yang rawan bencana alam seperti abrasi dan rob; (3) kawasan dengan permukiman yang kumuh; serta (4) tingkat perekonomian masyarakat yang masih rendah.

Pesisir Tambaklorok berada di kawasan pantai utara, sehingga sangat rentan terhadap bencana abrasi dan rob. Masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan laut harus menghadapi gelombang tinggi, yang berakibat pada kerusakan dinding rumah akibat hantaman dari gelombang laut. Beberapa bangunan di kawasan pesisir Tambaklorok juga mengalami penurunan tanah hampir 20 centimeter setiap tahunnya, sehingga sangat rawan terkena rob (Portal Berita Suara Jateng, Selasa, 2 Februari 2021). Penurunan tanah yang terjadi di pesisir Tambaklorok merupakan dampak dari meningkatnya kawasan industri di sekitar Tambaklorok, sistem drainase yang tidak baik, sistem pengelolaan air tanah yang tidak terkendali sehingga air di dalam tanah kosong dan amblas (Setyoko, 2021).

Gambar 1.1

Potret Permukiman di Kawasan pesisir Tambaklorok



Sumber: Dokumen RTBL Kampung Bahari Tambaklorok, 2016

Akibat dari adanya penurunan tanah setiap tahunnya, abrasi serta rob, berdampak pada struktur permukiman Tambaklorok menjadi kumuh. Selain itu, struktur permukiman kawasan pesisir Tambaklorok yang sangat padat dan tidak tertib mengakibatkan munculnya komunitas permukiman yang kumuh. Brahtz (1972) menyatakan bahwa wilayah pesisir yang berkembang menjadi kawasan permukiman, memiliki kompleksitas yang tinggi, sebagaimana dengan kawasan pesisir Tambaklorok yang memiliki permasalahan sangat kompleks, sebagai kawasan dengan tingkat penurunan tanah (*land subsidance*) yang tinggi, kawasan pesisir rawan bencana abrasi, rob, serta kawasan dengan tingkat permukiman yang padat dan tidak tertata sehingga berdampak pada struktur pemukiman kumuh.

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) tahun 2018 luas wilayah kumuh di Kota Semarang sebesar 120,91 Ha, dimana hampir 50% dari luas tersebut berlokasi di Kelurahan Tanjung Mas, dimana kampung nelayan Tambaklorok berada.

Tabel 1.1

Persebaran Luas Permukiman Kumuh di Kota Semarang Tahun 2018

No	Daerah Kelurahan	Kecamatan	Tipologi	Luas (Ha)
1	Bandarharjo	Semarang Utara	Kumuh berat	38,79
2	Panggung Lor	Semarang Utara	Kumuh berat	8,35
3	Tambaklorok, Tanjung Mas	Semarang Utara	Kumuh berat	64,77
4	Kuningan	Semarang Barat	Kumuh ringan	3,7
5	Tambakharjo	Semarang Barat	Kumuh ringan	5,3
Total				120,91

Sumber: Perkim.id

Kawasan permukiman yang kumuh di pesisir Tambaklorok juga disebabkan oleh banyaknya timbunan sampah di beberapa lahan kosong sekitar rumah warga dan tepi laut. Tumpukan sampah tersebut mengakibatkan bau yang sangat menyengat. Selain itu, saat tumpukan sampah tergenang air rob, mengakibatkan permukiman menjadi becek, kumuh dan kotor. Sampah yang menumpuk juga mengakibatkan sungai yang melintasi pemukiman warga mengalami pendangkalan.

Gambar 1.2

Potret tumpukan sampah pada area permukiman



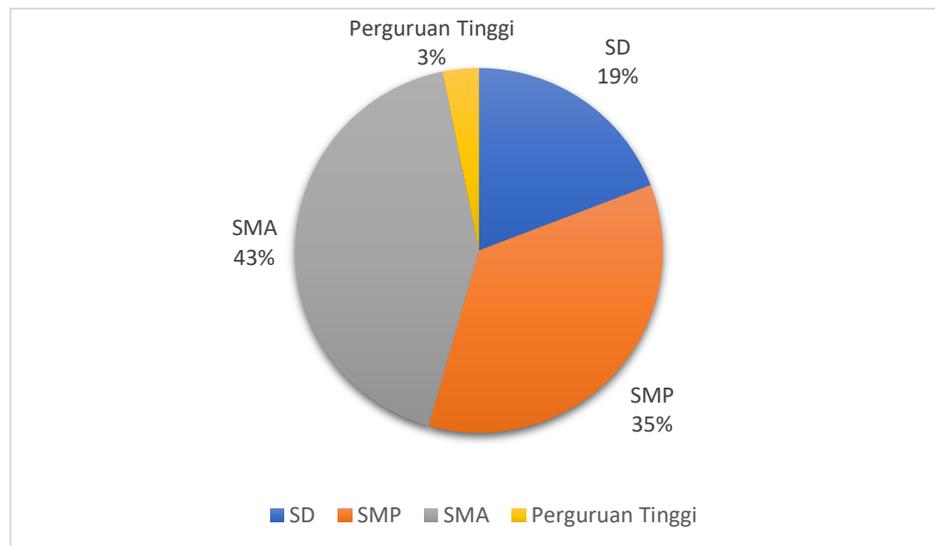
Sumber: Dokumen RTBL Kampung Bahari Tambaklorok, 2016

Selain menjadi daerah rawan bencana dan kumuh, kemiskinan juga menjadi sorotan bagi daerah pesisir Tambaklorok. Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Kajian Kemiskinan Pesisir Di Kota Semarang” oleh Natalia dan Alie (2014) dijelaskan bahwa wilayah pesisir Tambaklorok Kota Semarang merupakan wilayah miskin dengan bentuk kemiskinan natural. Kemiskinan yang terjadi disebabkan oleh faktor kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, kepemilikan modal usaha dan teknologi yang masih minim, serta pola kehidupan masyarakat yang mengalokasikan penghasilannya untuk hal – hal konsumtif. kualitas sumber daya manusia yang rendah disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih dibawah standar pendidikan masyarakat perkotaan. Masyarakat kawasan pesisir Tambaklorok menyelesaikan pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD) sebesar 19%, pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 35%, pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 43%, dan pendidikan setingkat Perguruan Tinggi hanya sebesar 3% (Data Monografi Kelurahan Tanjung Mas, 2020). Masih rendahnya tingkat pendidikan generasi

muda kawasan pesisir Tambaklorok berpengaruh terhadap kondisi perekonomian masyarakat. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, maka masyarakat juga akan mengalami keterbatasan untuk memilih dan mencari pekerjaan, dimana sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan dan buruh dengan tingkat pendapatan yang juga tidak terlalu besar. Hal tersebut berdampak pada tingkat perekonomian masyarakat masih rendah.

Gambar 1.3

Grafik tingkat Pendidikan masyarakat Tambaklorok tahun 2020



Sumber: Diolah dari data monografi kelurahan Tanjung Mas

Kemiskinan di kawasan pesisir Tambaklorok juga disebabkan oleh alokasi pendapatan masyarakat untuk memperbaiki dan meninggikan rumah demi menghindari ancaman rob. Musadun (2018) dalam penelitiannya “Upaya Adaptasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam Menghadapi Bencana Banjir Rob (Studi Kasus: Kampung Tambaklorok, Kota Semarang)” menjelaskan bahwa warga harus mengeluarkan biaya sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) hingga

Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setiap 5 – 10 tahun untuk meninggikan dan memperbaiki rumah demi terhindar dari ancaman rob yang terjadi hampir setiap hari. Sedangkan mayoritas warga berprofesi sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya. Penghasilan warga tidaklah cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari serta perbaikan rumah yang dari ancaman rob.

Berdasarkan berbagai narasi permasalahan di kawasan pesisir, diperlukannya suatu upaya yang tepat serta kerjasama seluruh pihak baik dari *stakeholder* maupun masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil dijelaskan bahwa pengelolaan kawasan pesisir serta pulau – pulau kecil meliputi proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, serta pengendalian potensi sumber daya yang dimiliki. Pengelolaan potensi tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai sektor. Seperti memberikan hak kepada masyarakat untuk mengusulkan penataan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi pengelolaan kawasan pesisir serta pulau – pulau kecil, pengaturan mengenai izin lokasi serta izin pengelolaan kepada setiap masyarakat yang terlibat, baik masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, serta masyarakat tradisional. Memberikan kewenangan kepada Menteri, Gubernur, serta Bupati/Walikota dalam pengelolaan daerah pesisir serta pulau – pulau kecil melalui berbagai regulasi. Undang – undang tersebut menjelaskan bahwa dalam pengelolaan kawasan pesisir serta pulau – pulau kecil perlu dilakukan secara terpadu. Pengelolaan kawasan

pesisir secara terpadu merupakan proses pemanfaatan potensi sumber daya pesisir serta pulau – pulau kecil yang berprioritas terhadap aspek konservasi serta keberlanjutan.

Pembangunan kawasan pesisir terpadu tidak hanya berorientasi pada *economic growth* atau pertumbuhan ekonomi saja, tapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan secara ekologi. Program pembangunan berkelanjutan memiliki prinsip bahwa kebutuhan saat ini terpenuhi, tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Tujuan utama dari konsep pembangunan berkelanjutan adalah untuk memberikan kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya secara bijak. Sehingga dalam konsep pembangunan pesisir harus disesuaikan dengan agenda *Sustainable Development Goals*.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) pilar yang harus terpenuhi dalam agenda *Sustainable Development Goals* Indonesia. 4 (empat) pilar tersebut yaitu: (1) Pilar pembangunan sosial, berkaitan dengan pemenuhan hak dasar manusia secara adil dan berkualitas; (2) Pilar pembangunan lingkungan, berkaitan dengan pengelolaan potensi sumberdaya dan lingkungan yang berkelanjutan; (3) Pilar pembangunan ekonomi, berkaitan dengan peningkatan perekonomian yang berkualitas melalui adanya peluang kerja dan usaha, tersedianya infrastruktur memadai, inovasi, industry inklusif, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan; dan (4) Pilar pembangunan hukum dan tata kelola guna terwujudnya kepastian hukum serta tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel serta partisipatif guna menghasilkan stabilitas keamanan negara yang berdasarkan hukum.

Serageldin, dalam Kismartini dan Bungin (2019) menjelaskan bahwa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan kawasan pesisir harus mencakup tiga aspek pembangunan, yaitu: (1) berkelanjutan secara ekologi dengan berprioritas pada perlindungan keanekaragaman hayati yang akan memberikan dampak terhadap keseimbangan ekosistem; (2) berkelanjutan secara ekonomi dengan mempertimbangkan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber daya yang efisien; serta (3) berkelanjutan sosial dengan menekankan pada pemeliharaan sistem sosial dengan keadilan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat.

Menurut Radcliffe, dalam Kismartini dan Bungin (2019) bahwa *“sustainable development requires a broader view of both economics and ecology than most practitioners in either discipline are prepared to admit, together with a political commitment to ensure that development is sustainable”*. Sehingga dalam suatu pembangunan perlunya keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan juga sosial politik agar menciptakan suatu pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai narasi kebijakan mengenai pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan, pemerintah Kota Semarang pada tahun 2014 mulai merencanakan suatu kebijakan pembangunan strategis dan berkelanjutan, yaitu kebijakan pembangunan program Kampung Bahari Tambaklorok. Kebijakan pembangunan ini merupakan instruksi khusus dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo dalam rangka mewujudkan tujuan dari program Nawacita presiden tahun 2014 dimana dalam program tersebut dijelaskan bahwa Indonesia merupakan suatu negara maritim, akan tetapi pembangunan di bidang maritim kurang mendapatkan atensi sehingga kekayaan bahari Indonesia belum dieksplorasi

secara optimal. Program pembangunan Kampung Bahari tertuang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2016 – 2021 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 yang kemudian dijelaskan secara terperinci dalam *masterplan* Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Tambaklorok 2016.

Kampung Bahari didefinisikan sebagai suatu penataan lingkungan tempat tinggal kawasan pesisir Tambaklorok, sehingga terwujudnya kawasan pesisir yang maju, asri, dan sejahtera dengan berbasis pada pengembangan lingkungan ekonomi lokal masyarakat. Tujuan dari adanya pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok sesuai dengan *masterplan* RTBL Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Kampung Bahari Tambaklorok akan menjadi kawasan yang memiliki ciri khas masyarakat bahari, memiliki kualitas kehidupan tinggi, yang diketahui dari indikator perbaikan ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 2) Kampung Bahari Tambaklorok akan menangkap irama serta semangat kelautan nusantara bagi masyarakatnya untuk mengembangkan diri dalam hal peningkatan kualitas permukiman, eksplorasi dan pengelolaan sumber daya laut, serta saling interaksi sebagai wujud dari entitas sosial.
- 3) Kampung Bahari Tambaklorok akan menjadi objek wisata baru yang menarik karena keunikan budaya kebaharian yang dimiliki (*living*

maritime culture), perlengkapan amenities dasar yang telah tercukupi, infrastruktur fisik yang memadai, serta arsitektur permukimannya yang menginspirasi.

Terdapat empat fokus sebagai upaya untuk mewujudkan program Kampung Bahari Tambaklorok, yaitu: (1) peningkatan kualitas lingkungan; (2) pemanfaatan potensi reklamasi untuk kegiatan ekonomi; (3) program pemberdayaan masyarakat; (4) program pelatihan serta pemberdayaan masyarakat

Perencanaan kebijakan pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok dilaksanakan dalam jangka waktu 20 tahun yang terbagi menjadi 4 (empat) fase lima tahunan, yaitu tahap lima tahunan pertama, tahap lima tahunan kedua, tahap lima tahunan ketiga, serta tahap lima tahunan keempat. Setiap fasenya memiliki tujuan pembangunan yang harus terselesaikan. Pada fase pertama, pembangunan difokuskan pada perbaikan kualitas lingkungan serta peremajaan permukiman Tambaklorok.

Pada fase kedua, melanjutkan proses peremajaan kawasan permukiman, pembangunan infrastruktur Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan jalur hijau, perbaikan akses jalan utama, serta pembangunan *sheet pile* keliling kawasan yang menjadi sistem polder untuk mengatasi masalah banjir dan rob.

Kemudian, pada fase ketiga mulai berfokus pada pengembangan perekonomian kawasan, seperti pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan area perdagangan jasa dan wisata kuliner sebagai pusat kegiatan kebaharian. Pada fase ketiga ini juga akan dilakukan reklamasi guna pembangunan rumah susun

yang diperuntukkan bagi penduduk terkena dampak dari program peremajaan kawasan yang dilakukan.

Selanjutnya pada fase keempat, pembangunan berfokus pada pengembangan kawasan ekonomi maritim serta kawasan khusus untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kawasan ekonomi maritim yang dikembangkan antara lain adalah ruang terbuka untuk tempat penjemuran ikan, bangunan – bangunan tempat pengolahan hasil laut untuk dijadikan makanan atau produk olahan lainnya yang dapat menambah nilai guna. Sedangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang akan dikembangkan berupa pantai dan area *sunspot* serta kawasan budidaya mangrove. Pembangunan fasilitas infrastruktur ini selain sebagai bentuk pelestarian lingkungan, juga dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata yang dapat meningkatkan perekonomian lokal kawasan.

Salah satu penelitian terdahulu yang relevan dan mendukung penelitian mengenai pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok yaitu penelitian yang berjudul “Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis *Sustainable Development* Di Kabupaten Sampang (Studi Pada BAPPEDA Kabupaten Sampang)” oleh Dian Marlina, Sarwono, dan Mochammad Rozikin, pada tahun 2016. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pesisir merupakan kawasan yang perlu dijaga kelestariannya karena merupakan kawasan yang sangat potensial untuk dikembangkan. Pemanfaatan kawasan pesisir perlu dilaksanakan secara terencana, rasional, bertanggung jawab, serasi dan seimbang dengan memperhatikan kelestarian lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui perencanaan yang terstruktur maka tersusun suatu keteraturan dalam pelaksanaan

pembangunan serta dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan peruntukan ruang dan pemanfaatan sumber daya secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa berbagai permasalahan dalam pengelolaan kawasan pesisir di Kabupaten Sampang dapat diminimalisir dengan berpedoman pada regulasi yang ada mengenai pengelolaan kawasan pesisir, yaitu RTRW Kabupaten Sampang tahun 2010 – 2029, karena pemerintah Kabupaten Sampang belum memiliki peraturan khusus mengenai pembangunan kawasan pesisir. Penerapan peraturan RTRW tersebut berdampak terhadap pengelolaan pesisir di Kabupaten Sampang. Dari segi perekonomian adanya peningkatan PDRB sektor perikanan sebanyak 6.359,21 juta. Dari bidang sosial terjadi peningkatan semangat gotong royong masyarakat yang melahirkan kelompok petani mangrove yang berperan dalam pengelolaan potensi mangrove. Dan dari segi lingkungan, lahan penanaman mangrove semakin luas, yang semula hanya 29 ha menjadi 31 ha. Luasnya lahan mangrove dapat bermanfaat terhadap peredam gelombang, pencegahan abrasi, serta tempat berkembangnya ikan. Sehingga terkait dengan pembangunan pesisir yang berkelanjutan diperlukannya kebijakan yang mampu mencakup tiga pilar utama dalam pembangunan pesisir yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Program Kampung Bahari bertujuan untuk menciptakan *sustainable development* kawasan pesisir Tambaklorok. Dimana, sejak proses perencanaan hingga proses pelaksanaan masyarakat selalu dilibatkan, tujuannya adalah agar masyarakat bersedia untuk terlibat dan berpartisipasi guna mendukung keberhasilan program Kampung Bahari. Akan tetapi, pada proses pelaksanaannya masyarakat

beranggapan bahwa keterlibatan mereka dalam proses perencanaan masih sangat minim serta masih terdapat beberapa penolakan dari masyarakat. Ariwibowo (2019) pada hasil penelitian yang berjudul “Sosialisasi Program Kampung Bahari Tambaklorok Semarang” menjelaskan bahwa proses pelibatan masyarakat Tambaklorok dalam program pembangunan Kampung Bahari masih sangat terbatas. Dalam proses sosialisasi yang dilakukan masih mengalami berbagai kendala, seperti kendala non teknis, dimana masyarakat pesisir memiliki karakter yang keras, keterbatasan akses informasi yang didapat sehingga tidak jarang mereka menerima informasi yang tidak valid, kemudian masyarakat masih berpegang teguh dengan kebudayaan dan tradisi yang dimiliki, sehingga mereka beranggapan bahwa ketika terdapat program pembangunan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka memiliki hak untuk menolak atau menerima.

Pada *platform* berita *online* Tribun Jateng (2018) menyebutkan bahwa program Kampung Bahari Tambaklorok khususnya pembangunan infrastruktur jalan utama dan pasar terdapat 40 rumah dan 1 pasar yang terdiri dari 50 lapak dan 21 kios yang terdampak. Dari beberapa warga yang terdampak relokasi pembangunan, terdapat 4 warga yang menolak dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang terkait besaran kompensasi yang diberikan. Berdasarkan penuturan salah satu warga yang rumahnya terdampak pembangunan jalan bernama Ahmad Suhaeri menjelaskan bahwa proses pembebasan lahan sejak awal memang sudah bermasalah, sosialisasi mengenai pembangunan dilakukan akan tetapi pendapat warga tidak direspon dengan baik oleh pemerintah. Selain itu, pelaksanaan pembangunan jalan tidak sesuai dengan *Detail Engineering Design*

(DED) yang telah disosialisasikan. Desain pembangunan awal jalan sebesar 20 meter diambil dari sisi kanan 10 meter dan sisi kiri 10 meter, akan tetapi dalam pelaksanaannya 20 meter sisi kiri semua.

Warga lain yang terdampak pembangunan bernama Muhlisin juga mengatakan bahwa nilai kompensasi yang diberikan jauh dari Nilai Objek Pajak (NJO) bangunan toko miliknya yang hanya dihargai pada nilai bangunan saja sejumlah 34 juta, sedangkan harga tanahnya tidak dinilai. Padahal menurut perhitungan harga tokonya mencapai 300 juta. Sehingga warga terdampak menegaskan bahwa lahan dan bangunan warga yang masih menjadi objek perkara tidak boleh dibongkar dan dilakukan pembangunan sampai ada putusan hukum yang berkekuatan tetap.

Selain masih adanya perselisihan dengan warga terdampak pembangunan, program Kampung Bahari Tambaklorok juga masih terhambat karena belum adanya status izin pinjam pakai aset dari PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Karena, pada dasarnya lahan yang menjadi lokasi pembangunan Kampung Bahari merupakan milik PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Sementara itu, banyak masyarakat yang telah memiliki status kepemilikan lahan. Sehingga, pada tahun 2015, pihak PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas telah menerbitkan hak pengelolaan lahan bagi lahan yang telah bersertifikat hak milik. Lahan yang telah dibebaskan masih sebagian saja, tepatnya di Kawasan Tambak Mulyo area yang digunakan sebagai pembangunan pasar, jalan utama, dan RTH, sedangkan sisanya masih dalam proses izin pinjam pakai.

Lokasi kawasan pesisir Tambaklorok sangatlah strategis, dekat dengan daerah industri, sehingga kawasan tersebut memiliki permasalahan yang begitu kompleks. Di kawasan pesisir Tambaklorok terdapat berbagai program pembangunan, yaitu pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok oleh Pemerintah Kota Semarang, program delineasi permukiman kumuh oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat di bagian Tambak Mulyo, dan program pembangunan relokasi Banjir Kanal Timur oleh Dinas Pekerjaan Umum di bagian Tambak Rejo. Hal tersebut mengakibatkan tumpang tindih pelaksanaan pembangunan. Misalnya pada program Pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok yang perlu melakukan perubahan eksisting karena adanya program relokasi Banjir Kanal Timur melalui pembangunan rumah deret di atas tanggul Banjir Kanal Timur, dimana seharusnya lokasi tersebut merupakan program konservasi mangrove, PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) dan dermaga dari Kampung Bahari. Dengan demikian diperlukannya sinergitas setiap rencana pembangunan yang ada di Kawasan Tambaklorok agar tidak terjadi tumpang tindih pembangunan.

Kebijakan pembangunan program Kampung Bahari Tambaklorok hingga saat ini masih berfokus pada peremajaan lingkungan permukiman, pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan jalur hijau, pengembangan jalan – jalan utama, relokasi pasar dan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pembangunan balai pertemuan apung, serta pembangunan *sheet pile* keliling kawasan yang menjadi sistem polder guna mengatasi permasalahan abrasi dan rob yang terjadi.

Pada tujuan pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok dijelaskan bahwa terdapat agenda pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, sampai saat

ini belum adanya kegiatan yang mendukung pembangunan perekonomian masyarakat secara massif. Program pemberdayaan masih berupa konsep dasar dan belum ada eksekusi secara langsung bersama dengan masyarakat, hanya di sosialisasikan saja bersama masyarakat.

Berdasarkan kondisi dilapangan yang telah dipaparkan, masih terdapat kesenjangan antara prinsip pembangunan berkelanjutan dengan pelaksanaan pembangunan program Kampung Bahari Tambaklorok. Dalam paradigma pembangunan berkelanjutan, yang diungkapkan oleh Emil Salim dalam Kismartini dan Bungin (2019) dijelaskan bahwa *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan memiliki beberapa prasyarat, yaitu: (1) Pembangunan yang menjangkau perspektif jangka panjang melebihi satu atau dua generasi; (2) Adanya hubungan keterkaitan (*interdependency*) antar pelaku dalam bidang lingkungan, sosial, dan buatan; (3) Pemenuhan kebutuhan manusia masa kini, tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang; (4) Pembangunan dilaksanakan dengan penggunaan sumber daya alam secara bijak dan pengelolaan limbah sesuai prosedur, serta pemanfaatan lingkungan, sosial, budaya, politik, dan ekonomi seoptimal mungkin.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan kebijakan pembangunan program Kampung Bahari Tambaklorok dalam rangka mewujudkan *sustainable development* wilayah pesisir Tambaklorok dengan mengangkat judul penelitian “Pembangunan Kampung Bahari dalam Perspektif *Sustainable Development* di Kawasan Pesisir Tambaklorok, Kota Semarang”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan data pada latar belakang dapat di identifikasikan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Dimensi Ekonomi
 - Masyarakat di kawasan pesisir Tambaklorok masih berada pada tingkat perekonomian rendah.
 - Pembangunan masih berorientasi pada pembangunan infrastruktur.
- 2) Dimensi Social
 - Tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah.
- 3) Dimensi Ekologi/Lingkungan
 - Kawasan pesisir Tambaklorok masih rawan abrasi dan rob serta termasuk dalam kawasan kumuh di Kota Semarang.
- 4) Dimensi Tata Kelola
 - Sosialisasi mengenai perencanaan pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok belum dilakukan secara tuntas kepada masyarakat
 - Status pemakaian lahan untuk pembangunan yang belum diselesaikan dengan PT. Pelabuhan Indonesia dan masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan uraian identifikasi permasalahan tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* (dimensi social, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dan

dimensi tata kelola) diterapkan dalam kebijakan pembangunan program Kampung Bahari Tambaklorok?

- 2) Apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* (dimensi social, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dan dimensi tata kelola) pada kebijakan pembangunan program Kampung Bahari Tambaklorok?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari hasil paparan mengenai rumusan masalah, tentunya terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Adapun tujuan tersebut antara lain:

- 1) Menganalisis penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*, (dimensi social, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dan dimensi tata kelola) diterapkan dalam kebijakan pembangunan program Kampung Bahari Tambaklorok.
- 2) Menganalisa kendala dalam penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* (dimensi social, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dan dimensi tata kelola) pada kebijakan pembangunan program Kampung Bahari Tambaklorok.

1.4. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam pengembangan teori – teori Ilmu Administrasi Publik, dan juga dapat digunakan sebagai pengembangan serta penalaran pada bidang kebijakan

publik khususnya pada kebijakan pembangunan berkelanjutan kawasan pesisir.

2) Manfaat Praktis

a. Penulis

Menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai penerapan kebijakan pembangunan kawasan pesisir yang berkelanjutan.

b. Universitas

Menambah literatur dan informasi sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan kebijakan pembangunan kawasan pesisir yang berkelanjutan.

c. Pemerintah Kota Semarang

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan serta pengelolaan kawasan pesisir di Kota Semarang.

d. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta menambah wawasan masyarakat mengenai proses pelaksanaan pembangunan kawasan pesisir untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat pesisir Tambak Lorok.

1.5. Kerangka Penelitian

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian, Tahun, Judul	Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sonya Dimitra; Nany Yuliasuti (2012). Potensi Kampung Nelayan Sebagai Modal Permukiman Berkelanjutan Di Tambaklorok, Kelurahan Tanjung Mas.	Pembangunan berkelanjutan	Metode deskriptif kuantitatif	Kampung Tambaklorok belum memenuhi kriteria kawasan pesisir yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terpenuhinya aspek pembangunan berkelanjutan, seperti aspek sosial yang menunjukkan bahwa kondisi sosial kampung nelayan masih berada pada kondisi permukiman yang kumuh miskin, sarana dan prasarana belum terpenuhi. Potensi yang dimiliki juga belum memberikan peningkatan bagi perekonomian masyarakat kampung nelayan, sehingga kampung nelayan Tambaklorok belum mampu memenuhi aspek pembangunan berkelanjutan.

No	Penelitian, Tahun, Judul	Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Dian Marlina; Sarwono; Mochammad Rozikin (2016). Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis <i>Sustainable Development</i> Di Kabupaten Sampang (Studi Pada BAPPEDA Kabupaten Sampang)	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan publik - Proses kebijakan publik - Desentralisasi - Pembangunan berkelanjutan - Tata ruang - Wilayah pesisir 	Metode deskriptif kualitatif	Pengelolaan kawasan pesisir di Kabupaten Sampang mengacu pada pasal 7 Rencana Tata Ruang Wilayah 2010 – 2029. Terdapat 4 strategi utama dalam pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Sampang, yaitu adanya zonasi kawasan pesisir, terjalannya kerjasama antar <i>stakeholders</i> , program peningkatan perekonomian melalui pemanfaatan potensi mangrove dan terumbu karang, serta pengendalian kawasan hutan mangrove yang dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.
3.	Riskana Firdya; Kismartini. (2018). Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tanggung (PKPT) Di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Publik - Evaluasi Kebijakan Publik 	Metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian mengenai evaluasi dampak menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tetapi pada kegiatan bina usaha, tidak memberikan dampak yang positif, hal tersebut dikarenakan sudah tidak adanya modal yang tersedia,

No	Penelitian, Tahun, Judul	Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		- Evaluasi dampak program		sehingga masyarakat tidak dapat melanjutkan program usaha yang telah dilakukan.
4.	Retno Setianingtias; M. Baiquni; Andi Kurniawan. (2019). Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.	- Pembangunan Berkelanjutan	Metode kuantitatif	Model pembangunan berkelanjutan yang terbentuk menunjukkan bahwa dimensi sosial, ekonomi, lingkungan dan kelembagaan yang tersusun atas indikator-indikator terpilih sudah valid dan reliable untuk menggambarkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia pada level provinsi. Hubungan antar konstruk sebagian besar terbukti, yang artinya antar konstruk sosial, ekonomi, lingkungan dan kelembagaan saling berhubungan. Hubungan yang ada antar dimensi menunjukkan perubahan pada satu dimensi akan mempengaruhi dimensi lainnya. Namun terdapat hubungan yang tidak terbukti yaitu hubungan antara kelembagaan dan lingkungan.

No	Penelitian, Tahun, Judul	Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Dicky Siswanto Renggi Tay; Sugeng Rusmiwari. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan berkelanjutan - Implementasi kebijakan 	Metode deskriptif kualitatif	Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Dalam implementasinya pembangunan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat melalui kegiatan musrenbang desa. Kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di Desa Tlengkung adalah masih adanya pro dan kontra dari masyarakat karena kurangnya wawasan dan pola pikir masyarakat mengenai pembangunan berkelanjutan. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah Desa Tlengkung dalam pengambilan keputusannya didasarkan pada peraturan yang berlaku.
6.	Zihni Ihkamuddin; A. Octavian; I Nengah Putra. (2019). Efektivitas Program Kampung Bahari dalam Menjaga Kondisi Sosial Masyarakat	<i>Soft System Methodology (SSM)</i>	Metode Kualitatif	Respon masyarakat terkait program Kampung Bahari masih kurang antusias. Kerjasama antara masyarakat dan <i>stakeholder</i> juga belum terkoordinasi secara optimal. Perlunya program pembangunan sosial yang sesuai

No	Penelitian, Tahun, Judul	Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Pesisir di Semarang dari Perspektif Sosiologi Maritim.			dengan kebutuhan masyarakat, serta perlunya pengawasan dan <i>monitoring</i> dari <i>stakeholder</i> yang bersangkutan. Untuk menjalin kerjasama antara masyarakat dan <i>stakeholder</i> diperlukannya koordinasi antar instrumen masyarakat, pemerintah tingkat daerah hingga nasional dalam rangka mewujudkan program pembangunan yang berkelanjutan.
7.	Putut Cahyo Nugroho (2019). Kajian Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Implementasi Kampung Bahari Tambaklorok.	Implementasi Kebijakan Publik	Metode Kualitatif	Kampung Tambaklorok memiliki potensi ekonomi bahari yang dapat ditransformasikan dalam kegiatan perdagangan serta industri maritim. Saat ini, Tambaklorok dalam tahap pembangunan menuju kampung wisata bahari. Penataan Kampung Tambaklorok memiliki beberapa konsep yang diajukan untuk menjadi kampung wisata bahari. sehingga proses perencanaan dan implementasi kebijakan harus diperhitungkan secara matang terutama dalam koordinasi awal. Pada pelaksanaannya Pemerintah Kota Semarang sangat terburu –

No	Penelitian, Tahun, Judul	Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				buru dalam merealisasikan program Kampung Bahari ini, sehingga Pemerintah Kota Semarang tidak siap dalam penyusunan anggaran “pendamping” untuk pembebasan lahan yang berdampak pada implementasi program Kampung Bahari yang belum optimal.
8.	Juarni Anita (2020). Perencanaan Kampung Bahari sebagai Upaya Keberlanjutan, Perkampungan Nelayan Tambaklorok, Semarang	Konsep pembangunan berkelanjutan daerah pesisir	Metode deskriptif kualitatif	Perencanaan Kampung Bahari di perkampungan nelayan Tambak Lorok merupakan program pemerintah untuk meremajakan kembali perkampungan nelayan dan menghilangkan kekumuhan yang telah lama melekat pada perkampungan nelayan Tambak Lorok. Kampung Bahari ini juga merupakan bagian dari penataan kawasan pesisir untuk keberlanjutan lingkungan di kawasan pesisir, dengan mengusung keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Perencanaan Kampung Bahari meliputi pembangunan infrastruktur untuk kemudahan aksesibilitas dan ketangguhan lingkungan terhadap bencana banjir, dan menjadikan

No	Penelitian, Tahun, Judul	Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				kampung yang layak huni dengan menyediakan prasarana dan sarana umum. Program Kampung Bahari akan menjadikan Tambak Lorok menjadi pusat ekonomi kelautan, industri perikanan, pusat wisata bahari dan kuliner makanan laut di Kota Semarang.
9.	Daniella Ferrol Schulte; Matthias Wolff, Sebastian Ferse; Marion Glaser. (2013). <i>Sustainable Livelihoods Approach in tropical coastal and marine social–ecological systems: A review.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sustainable Livelihoods Approach</i> - <i>CM – SES yang meliputi bio geophysical unit, Social actors, and Institutions</i> 	Metode deskriptif kualitatif	Pengelolaan sumber daya dan strategi pengentasan kemiskinan dalam sistem yang pada dasarnya kompleks ini memerlukan pendekatan yang adaptif, relevan dengan konteks, dan holistik. Pendekatan proyek yang sangat ambisius seperti Program Mata Pencaharian Perikanan Berkelanjutan. Selain itu tantangan yang dihadapi seperti pertimbangan pemangku kepentingan, korupsi, kurangnya aset dan kapasitas modal lokal, serta struktur dan pendekatan tata kelola yang lemah.

No	Penelitian, Tahun, Judul	Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
10.	Ibnu Sina; Mayunani; J. Batoro; N. Harahab. (2017). <i>Sustainable Living Hood Analysis (SLA) of Coastal Communities in Mangrove Forest Area in Pasuruan Regency East Java.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Coastal community</i> - <i>Sustainable livelihoods</i> - <i>Pentagon asset</i> 	Metode deskriptif kuantitatif	Kepemilikan lima asset mata pencaharian masyarakat pesisir di Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dapat mempengaruhi strategi yang digunakan oleh seluruh masyarakat yang tinggal di desa tersebut. Setiap individu dari masyarakat di Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan memiliki permasalahan yang berbeda. Jadi dibutuhkan juga strategi berbeda untuk mengatasinya dan mewujudkan kemakmuran

Hasil penelitian terdahulu menjelaskan mengenai narasi permasalahan kawasan pesisir, analisis potensi kawasan pesisir, serta pembangunan kawasan pesisir melalui program pembangunan kawasan pesisir tangguh. Pada penelitian terdahulu pelaksanaan pembangunan kawasan pesisir dilihat dari sudut pandang kebijakan lingkungan hidup dan juga kebijakan pembangunan. Prinsip pembangunan kawasan pesisir yang berkelanjutan hanya berfokus pada tiga prinsip pembangunan, yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi lingkungan. Sehingga yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah, kebijakan pembangunan kawasan pesisir akan dianalisis melalui sudut pandang teori Administrasi Publik dan Kebijakan Publik, sehingga dalam prinsip pembangunan berkelanjutan kawasan pesisir Tambaklorok, penulis menambahkan satu dimensi yang relevan dengan bidang Administrasi Publik yaitu dimensi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana prinsip *Sustainable Development Goals (SDG's)* yang dirancang oleh BAPPENAS bahwa terdapat 4 (empat) pilar pembangunan berkelanjutan yaitu: (1) Pertumbuhan dan keadilan ekonomi; (2) Pembangunan sosial; (3) Konservasi sumber daya alam (perlindungan lingkungan); dan (4) Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Hasil penelitian Implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang (Kismartini dan Bungin, 2019) menjelaskan bahwa seiring berkembangnya penelitian, dimensi politik dan tata kelola sangat mempengaruhi kegiatan implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir. Sehingga untuk mewujudkan pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan

diperlukannya empat dimensi pembangunan yakni dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola.

1.5.2. Administrasi Publik

Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber – sumber sehingga tugas dan pekerjaan dalam organisasi tingkat apapun dapat dilaksanakan dengan baik (Anggara, 2016:11). Administrasi menurut A. Dunsire, (dalam Keban, 2014:2) diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip – prinsip implementasi kebijakan public, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan – pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa public, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik. Sehingga administrasi tidak hanya diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan yang berkaitan dengan pengaturan file, membuat laporan administrasi, dan lain sebagainya. Tetapi administrasi juga merupakan kegiatan mengelola mengimplementasikan, dan memutuskan suatu kebijakan.

Menurut Chandler dan Plano (1988: 29 – 30) Administrasi Publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel public diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan – keputusan dalam kebijakan publik. Selain itu, administrasi publik merupakan konsep yang sangat berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat,

lebih mengutamakan kemandirian dan kemampuan masyarakat karena pemerintah memberi kesempatan tersebut kepada masyarakat (Keban, 2014: 4 – 5).

Nicholas Henry (dalam Keban, 2014:6) juga mengemukakan bahwa Administrasi Publik adalah suatu kombinasi antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosikan pemahaman tentang peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong agar kebijakan publik lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Berdasarkan dari berbagai definisi tersebut dapat diketahui bahwa Administrasi Publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah berupa kegiatan perumusan kebijakan, pengelolaan sumber daya (manusia, informasi, harta benda), pengimplementasian atau pelaksanaan kebijakan untuk keberlangsungan kepentingan publik.

1.5.3. Paradigma Administrasi Publik

Administrasi Publik merupakan ilmu pengetahuan yang dinamis dan telah mengalami perubahan dan pembaharuan dari waktu ke waktu sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Di dalam perkembangannya Administrasi Publik telah mengalami enam perubahan paradigma. Paradigma yang muncul merupakan sudut pandang para ahli tentang perananan dan tantangan Administrasi Publik dalam menjawab masalah yang muncul.

Dalam setiap perubahannya paradigma Administrasi Publik selalu menekankan pada apakah “*locus*” dan “*focus*” dari Administrasi Publik sudah

tepat atau belum. *Locus* merupakan tempat/letak kelembagaan dari Administrasi Publik, misalnya pada birokrasi pemerintahan. Sedangkan *focus* adalah suatu yang dikhususkan bagi atau dari Administrasi Publik. Dengan *locus* dimaksudkan sebagai “tempat” atau “letak”, dan *focus* diartikan sebagai “apa” yang dipelajari. Nicolas Henry (1995: 21 – 49) mengemukakan perkembangan paradigma Administrasi Publik sebagai berikut:

a. Dikotomi Politik – Administrasi (1900 – 1926)

Asumsi dari paradigma ini adalah gagasan pemisahan politik dan administrasi sebagai cara untuk menentukan efisiensi dan efektivitas. Woodrow Wilson (1897) menyatakan empat persyaratan Administrasi Publik yang efektif yaitu: (1) Pemisahan politik dan administrasi; (2) Analisis komparatif dari organisasi politik dan swasta; (3) Meningkatkan efisiensi dengan praktik dan sikap seperti bisnis terhadap operasi sehari – hari; (4) Meningkatkan efektivitas layanan publik melalui manajemen dan pelatihan pegawai negeri sipil, serta mendorong penilaian berbasis prestasi.

Implikasi dari paradigma ini yaitu, administrasi harus dilihat sebagai sesuatu yang bebas nilai, artinya tidak boleh dipengaruhi oleh nilai apapun dan diarahkan untuk mencari nilai efisiensi dan ekonomi dari *government bureaucracy*. Kekurangan dari paradigma ini yaitu hanya menekankan pada aspek lokus saja yaitu birokrasi pemerintahan (*government bureaucracy*) tetapi fokus atau metode apa yang harus dikembangkan dalam Administrasi Publik kurang dibahas secara jelas dan terperinci.

b. Prinsip – prinsip Administrasi (1927 – 1937)

Prinsip – prinsip administrasi bersifat universal yang dapat diterima dimana saja dan kapan saja. Prinsip – prinsip administrasi sebagai fokus Administrasi Publik. Gullick dan Urwick (1937) mengemukakan bahwa prinsip – prinsip administrasi tersebut yaitu *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting* (POSDCORB). Lokus dari Administrasi Publik tidak pernah dituangkan secara jelas karena mereka beranggapan bahwa prinsip – prinsip tersebut dapat berlaku dimana saja termasuk organisasi pemerintahan. Dengan demikian, pada paradigma ini fokus lebih ditekankan daripada lokusnya.

c. Ilmu Administrasi Publik Sebagai Ilmu Politik (1950 – 1970)

Menurut Herbert Simon, politik dan administrasi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Administrasi negara bukanlah sesuatu yang bebas nilai (*value free*) atau berlaku dimana saja tetapi justru dipengaruhi oleh nilai – nilai tertentu. Pada periode ini merupakan suatu upaya untuk membangun kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dengan ilmu politik. Dalam paradigma ini, Administrasi Publik sebagai ilmu politik dimana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan. Sedangkan fokusnya menjadi kabur. Pada masa ini, Administrasi Publik mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap disiplin yang sangat dominan dalam dunia Administrasi Publik.

d. Ilmu Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956 – 1970)

Dalam paradigma ini, prinsip – prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi, dsb merupakan fokus dari paradigma ini. Dua arah perkembangan terjadi pada paradigma ini:

- 1) Yang berorientasi terhadap perkembangan ilmu administrasi murni yang di didukung oleh disiplin psikologi sosial.
- 2) Yang berorientasi kepada kebijakan publik, semua fokus yang dikembangkan disini diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya di dunia bisnis tetapi juga di dalam dunia Administrasi Publik karena itu lokusnya menjadi tidak jelas.

e. Administrasi Publik Sebagai Administrasi Publik (1970 – sekarang)

Paradigma ini memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus Administrasi Publik dalam paradigma ini adalah pada teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Lokusnya adalah pada isu dan kepentingan publik (urusan publik dan kebijakan publik).

f. *Governance* (1990 – sekarang)

Paradigma ini menekankan perubahan persepsi pemerintah dan administrasi. Menurut J.S Endarlin bahwa *governance* merupakan suatu terminology yang digunakan untuk menggantikan istilah *government*, yang menunjukkan penggunaan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah – masalah kenegaraan. Istilah ini secara khusus

menggambarkan perubahan peranan pemerintah dari pemberi pelayanan kepada *enabler* atau fasilitator, dan perubahan kepemilikan yaitu dari milik negara menjadi milik rakyat (Dharma, 2002: 223).

Menurut Rachhman Achwan, konsep *good governance* pada mulanya muncul akibat gelombang besar demokrasi dan ekonomi pasar berskala global yang mendorong pentingnya meletakkan dengan sejajar peran institusi makro, yakni: Negara, pasar (ekonomi) dan masyarakat sebagai troika (mitra) dalam membangun *good governance*. Paradigma tersebut merupakan revisi dari paradigma lama (*rule government*), dimana menurut paradigma *rule government* lebih senantiasa menyandarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku (Martin Jimung, 2005: 95 – 96).

Dari keenam paradigma Administrasi Publik di atas, penelitian mengenai kebijakan pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok, Kota Semarang dalam perspektif pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) termasuk dalam paradigma kelima dan keenam, yaitu paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik dan paradigma *Good Governance*.

Penelitian mengenai kebijakan pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok sesuai dengan paradigma kelima mengenai Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik karena paradigma tersebut sudah memiliki fokus dan lokus yang jelas terhadap teori kebijakan publik, seperti dalam kebijakan pembangunan. Fokus dalam penelitian ini adalah

bagaimana kebijakan pembangunan berkelanjutan diterapkan dalam program pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok, sedangkan lokus dalam penelitian ini berada di kawasan pesisir Tambaklorok, Kota Semarang. Kemudian, penelitian ini juga terkait dengan paradigma *good governance* karena prinsip *good governance* merupakan suatu prinsip penyelenggaraan kebijakan pembangunan dan bertanggung jawab dengan prinsip demokrasi serta mengandung pengertian nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional, dan pemerintah yang efektif dan efisien untuk kepentingan publik.

1.5.4. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan tindakan pengambilan keputusan dari serangkaian pilihan yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam konsep kebijakan publik, sering diartikan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sejalan dengan tujuan yang telah direncanakan oleh pemerintahan. Dye (1991) mengungkapkan bahwa kebijakan publik merupakan setiap tindakan yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Pendapat tersebut juga didukung oleh Islamy (2007: 20) yang mengungkapkan bahwa, kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah dengan berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Sehingga dapat diketahui bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk respon dari pemerintah mengenai permasalahan yang ada.

Bobrow dan Dryzek (1987) mengungkapkan bahwa terdapat lima paradigma yang populer dalam menangani permasalahan publik sebagai wujud dari pelaksanaan kebijakan publik, yaitu: (1) *welfare economic*, menjelaskan bahwa dalam pemilihan suatu alternatif kebijakan perlu memperhitungkan aspek keuntungan dan kerugian sebagaimana prinsip ekonomi; (2) *Public choice* yang berarti bahwa pemilihan alternatif kebijakan atau keputusan mengutamakan lembaga atau organisasi yang mengatasnamakan atau mewakili publik (3) *Social structure*, menjelaskan bahwa dalam pemilihan alternatif kebijakan harus memperhitungkan kepentingan masyarakat dari berbagai lapisan; (4) *information processing* berarti bahwa dalam memilih alternatif kebijakan, informasi dan data yang dibutuhkan perlu diteliti tingkat kualitasnya, kemudian diproses serta dianalisis secara benar agar dapat memberikan kesimpulan yang tepat; serta (5) Filsafat politik yang menjelaskan bahwa dalam pemilihan alternatif kebijakan perlu memperhitungkan nilai moral yang berlaku.

Setiap keputusan yang diambil dalam kebijakan publik berdasarkan permasalahan yang menjadi keresahan oleh masyarakat serta keputusan diambil berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat (*public needs*). Frederick (1980) menyatakan bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu seseorang, kelompok, atau organisasi pemerintah dengan menunjukkan berbagai konsekuensi terhadap

pelaksanaan kebijakan yang diusulkan, dalam rangka mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Keban (2014: 61) menyatakan bahwa pada umumnya kebijakan publik memiliki beberapa jenis berdasarkan tujuan yang akan dicapai, yaitu: (1) *Regulatory* bertujuan untuk mengatur perilaku setiap orang; (2) *Redistributive* bertujuan untuk mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikannya kepada yang miskin; (3) *Distributive* bertujuan untuk melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumberdaya tertentu; dan (4) *Constituent* bertujuan untuk melindungi negara. Setiap jenis dari kebijakan publik ini dapat dipahami dari tujuan dan target suatu program atau proyek sebagai wujud konkrit atau terjemahan dari suatu kebijakan.

Kebijakan publik harus dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur agar dapat mengatasi permasalahan yang ada di dalam masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan publik. Dunn (2004) menjelaskan bahwa, tahapan dalam perumusan kebijakan public terdiri dari penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi kebijakan (*policy adoption*), implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan penilaian kebijakan (*policy assessment*). Secara terperinci tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Agenda kebijakan: dalam tahap ini dilakukan penentuan apa yang menjadi masalah publik yang perlu dipecahkan.

- b. Formulasi kebijakan: para analisis mengidentifikasi kemungkinan kebijakan yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah.
- c. Adopsi kebijakan: merupakan tahap dimana ditentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para – administrator dan legislatif.
- d. Implementasi kebijakan: merupakan suatu tahap dimana kebijakan yang telah diadopsi tersebut dilaksanakan oleh unit – unit administratif tertentu dengan memobilisasikan dana dan sumberdaya yang ada.
- e. Penilaian kebijakan: dalam tahap ini, dilakukan penilaian apakah semua proses implementasi telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau tidak.

Kebijakan publik dibuat untuk mengatasi berbagai masalah yang ada dan bertujuan untuk mewujudkan suatu pembangunan membawa ke tatanan hidup yang lebih baik. Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja (dalam Anggara, 2016: 506) menjelaskan bahwa secara universal kebijakan publik berfungsi melakukan analisis kebijakan untuk mengatasi berbagai persoalan kemasyarakatan yang luas, berkesinambungan, dan terus meningkat. Persoalan – persoalan tersebut kemudian dikenal sebagai persoalan pembangunan. Analisis kebijakan publik bermaksud mencari alternatif – alternatif pemecahan atas persoalan pembangunan.

1.5.5. Kebijakan Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan secara terus menerus menuju keadaan yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Todaro

(dalam Muhammad, 2017: 1) mengemukakan bahwa terdapat tiga konsep dasar dalam pembangunan, yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok, peningkatan kualitas diri, serta kebebasan dalam memilih. Sehingga pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai hal mendasar mengenai struktur sosial masyarakat serta akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui penanganan ketimpangan pendapatan, serta kemiskinan. Pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (*ekonomi growth*) saja, tetapi juga berupaya membangun kehidupan sosial masyarakat, sebagai subjek dan tujuan dalam pembangunan. Sudjana (dalam Elviza, 2018: 22) menerangkan bahwa pembangunan merupakan proses dinamisasi, demokratis, serta modern. Yang bermakna bahwa proses pembangunan merupakan suatu upaya yang edukatif dalam rangka memberdayakan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dalam semua aspek kehidupan baik aspek sosial maupun ekonomi.

Suatu pembangunan tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi membutuhkan proses yang terencana serta terstruktur. Sehingga untuk mewujudkan kebijakan pembangunan yang berdampak bagi kehidupan bernegara diperlukannya proses perencanaan pembangunan yang tersusun secara komprehensif. Perencanaan pembangunan merupakan proses pengarahan dalam penggunaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pembangunan secara efektif dan efisien, demi tercapainya tujuan dari pembangunan, yaitu kemajuan dalam bidang sosial maupun ekonomi (Listyaningsih, 2014:92).

Dalam proses perumusan kebijakan pembangunan, terdapat dua pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan secara *top down* dan *bottom up*, atau kombinasi dari keduanya. Pendekatan *top down* (atas – bawah) merupakan perumusan kebijakan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang kemudian direalisasikan oleh pihak di bawahnya hingga sampai kepada masyarakat, sedangkan pendekatan *bottom up* (bawah – atas) merupakan proses perumusan kebijakan pembangunan dengan mendengarkan berbagai permasalahan dari masyarakat kemudian pihak yang berwenang melakukan perumusan kebijakan yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian kombinasi antara kedua pendekatan *top down* dan *bottom up* terdapat komunikasi serta diskusi dari pemegang kekuasaan serta masyarakat pada pihak bawah dalam proses perumusan kebijakan pembangunan (Elviza, 2017: 24).

Kebijakan pembangunan di Indonesia sebagaimana tercantum pada alenia keempat pembukaan Undang – undang Dasar 1945 bahwa pembangunan bertujuan untuk: (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) Memajukan kesejahteraan umum; (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Rahayu (2004: 140) menjelaskan bahwa untuk mewujudkan keberhasilan dalam kebijakan pembangunan harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1) Pembangunan sumber daya manusia

Pembangunan yang telah dilaksanakan diberbagai negara berkembang seperti Indonesia sangat berorientasi pada tingkat pertumbuhan perekonomian yang berakibat pada meningkatnya kerusakan alam, hancurnya sistem sosial, ekonomi, agama budaya serta kearifan lokal masyarakat. Era globalisasi saat ini memandang bahwa, jika perekonomian global berjalan dengan baik, maka agenda pembangunan lainnya akan berjalan seirama. Pada kenyataanya jika pembangunan lebih menekankan pada dimensi ekonomi serta tidak diimbangi dengan penanganan masalah perekonomian seperti kemiskinan, justru akan memunculkan adanya *trickle – down effect*, karena system pembangunan sangat bergantung pada dimensi ekonomi. Keller (2017) mengungkapkan bahwa *money was all appropriated for the top in the hopes it would trickle down to the needy*. Dominasi pembangunan perekonomian justru mendorong penguatan ekonomi pada pihak yang kuat. Untuk itu dalam pembangunan juga perlu mempertimbngakan sumber daya manusia sebagai subjek utamanya pembangunan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh D. C. Korten (1984) bahwa pembangunan yang ideal merupakan pembangunan yang berorientasi pada sumber daya manusia sebagai subjek utamanya atau *“people centered development”* bukan *“production oriented development”*. Pada prinsipnya, jika pembangunan dilaksanakan dengan prinsip *people centered development* akan mendukung pelaksanaan pembangunan. Karena

sumber daya manusia merupakan sumber penggerak dari pembangunan itu sendiri.

Human Development Report (1996: 55 – 56) mengungkapkan bahwa terdapat tiga dimensi utama dalam pembangunan sumber daya manusia, yaitu: (1) kemampuan (*capacity*); (2) pemerataan (*equity*); (3) pemberdayaan (*empowerment*). Kemudian Bryant dan White mengungkapkan bahwa perlunya dimensi *sustainability* dalam pembangunan yaitu pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

2) Desentralisasi pembangunan

Indonesia terdiri dari berbagai wilayah dengan berbagai macam karakteristik. Sehingga, kebijakan pembangunan yang telah dibuat, terkadang tidak mampu mengakomodasi semua wilayah serta tidak semua kebijakan pembangunan dapat diterapkan di berbagai wilayah yang memiliki berbagai macam karakteristik.

Untuk mendukung tercapainya konsep dasar pembangunan, yaitu kemampuan produksi (*capacity*), pemerataan (*equity*), pemberdayaan (*empowerment*), keberlanjutan (*sustainability*) diperlukannya penerapan konsep desentralisasi pembangunan.

Desentralisasi yang dimaksudkan tidak hanya proses pendelegasian wewenang dari otoritas formal dalam bentuk dekonsentrasi serta devolusi, akan tetapi termasuk dalam proses penyerahan otonomi daerah sepenuhnya

kepada setiap wilayah sesuai dengan prinsip otonomi daerah agar dapat mewujudkan pemerataan pembangunan (Sofian Effendi, 1993).

3) Partisipasi masyarakat

Salah satu faktor pendukung tercapainya tujuan pembangunan adalah adanya partisipasi aktif dari masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan melalui organisasi – organisasi masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat suatu pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan efisien yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4) Perubahan konsentrasi pembangunan spasial

Dinegara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, pembangunan selalu terkonsentrasi pada kota – kota besar, sehingga menimbulkan berbagai masalah perkotaan yang disebabkan oleh urbanisasi, seperti kerawanan sosial, kemacetan jalan, dan juga kesempatan kerja yang semakin sempit. Untuk itu perlu dilakukan perumusan kembali kebijakan pembangunan agar tidak terpusat pada pembangunan di kota – kota besar. (Simon, 1983). Misalnya dengan melalui pembangunan desa menjadi kota – kota satelit, mendistribusikan pekerjaan dan perumahan di luar pusat kota.

1.5.6. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pelaksanaan pembangunan pada era modern sangat berorientasi pada pertumbuhan perekonomian. Asumsinya bahwa, jika tingkat perekonomian mengalami kenaikan secara signifikan akan berdampak positif terhadap bidang lain. Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan perekonomian, seringkali melakukan berbagai cara agar suatu pembangunan dapat dilaksanakan dan mendapatkan keuntungan, misalnya dengan melakukan pelanggaran Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), merusak lingkungan, mengganggu sistem sosial masyarakat, hingga melakukan eksploitasi sumber daya alam. Konsep pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* lahir untuk memberikan batasan – batasan dalam pelaksanaan pembangunan. Konsep pembangunan berkelanjutan dirumuskan oleh *World Commission on Environmental and Development (WCED)* pada tahun 1987 dan resmi diterima secara internasional. Dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pelaksanaan pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Kismartini dan Bungin, 2019: 73). Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana, efisien, dan memperhatikan keberlangsungan pemanfaatannya baik untuk generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

United Nation Development Program (UNDP) menjelaskan konsep pembangunan berkelanjutan dalam program global dan jangka panjang yang

tertuang dalam agenda *Sustainable Development Goals* atau SDG's. Dalam agenda SDG's dijelaskan bahwa pembangunan bergeser pada perubahan – perubahan kearah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan pada hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. *Sustainable Development Goals* atau SDG's merupakan agenda pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. SDG's terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan serta 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian rencana pembangunan berkelanjutan tahun 2015 lalu, yaitu *Millennium Development Goals* (MDG's). 17 (tujuh belas) tujuan SDG's tersebut yaitu:

- 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun;
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan;
- 3) Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia;
- 4) Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- 6) Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua;
- 7) Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua;

- 8) Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua;
- 9) Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi;
- 10) Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara;
- 11) Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
- 12) Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
- 13) Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan;
- 15) Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi desertifikasi (penggurunan), serta menghambat dan mengembalikan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati;
- 16) Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi – institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level;
- 17) Memperkuat ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Badan Perencanaan Nasional sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan nasional merumuskan agenda *Sustainable Development Goals* atau SDG's Indonesia kedalam 4 pilar pembangunan yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.3

Pilar Pembangunan Berkelanjutan menurut BAPPENAS tahun 2020

No	Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
1.	Pilar pembangunan sosial, demi tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara	a) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. b) Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. c) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. d) Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. e) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
2.	Pilar pembangunan lingkungan, melalui pengelolaan sumberdaya	a) Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

	<p>alam dan lingkungan yang berkelanjutan</p>	<p>b) Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.</p> <p>c) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.</p> <p>d) Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.</p> <p>e) Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.</p> <p>f) Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.</p>
3.	<p>Pilar pembangunan ekonomi, demi tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industry inklusif,</p>	<p>a) Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua.</p> <p>b) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja, yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.</p>

	infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan	<p>c) Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industry inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.</p> <p>d) Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.</p> <p>e) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.</p>
4.	Pilar pembangunan hukum dan tata kelola untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.	a) Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Sumber: Metadata indicator tujuan pembangunan berkelanjutan BAPPENAS, 2020

Pada tabel 1.3 dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) pilar dalam pembangunan berkelanjutan, setiap pilar pembangunan memiliki beberapa tujuan

yang disesuaikan dari tujuan global pembangunan berkelanjutan. Begitu pula dengan pembangunan berkelanjutan kawasan pesisir, terdapat 4 dimensi pembangunan. Pada buku yang berjudul “Wilayah Pesisir Indonesia, Narasi Kebijakan Publik, Masalah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil di Indonesia” Kismartini dan Bungin (2019) menjelaskan bahwa pembangunan kawasan pesisir dikatakan berkelanjutan jika memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu sebagai berikut:

1) Dimensi Ekologi

Pemanfaatan sumber daya pesisir baik di area darat maupun laut sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan sumber dayanya. Jika pemanfaatan sumber daya melebihi daya dukung akan berakibat pada penurunan sumber daya secara kualitas maupun kuantitasnya. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Usaha Konservasi;
- b. Memperhatikan daya dukung pesisir;
- c. Perlindungan keanekaragaman hayati.

2) Dimensi Ekonomi

Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi saja, namun tetap memperhatikan daya dukung ekonomi sumber daya pesisir dalam rangka menjamin kelangsungan produktivitas sumber daya. Pertumbuhan perekonomian haruslah dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga

kerja. Sebagai indikator pertumbuhan ekonomi sumber daya pesisir perlu memberikan kontribusi terhadap perekonomian wilayah, seperti peningkatan PDRB (Produk Domestik Bruto) dan pemerataan pendapatan. Masydzulhak (2004) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat atau GDP (*Gross Domestic Product*) dimana kenaikannya dibarengi dengan modernisasi serta aspek keadilan pendapatan (*income equity*). Sehingga pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir dalam dimensi ekonomi perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. Penyerapan tenaga kerja;
- c. Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. Peningkatan infrastruktur;
- e. Kestabilan produktivitas.

3) Dimensi Sosial

Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dimensi sosial dapat mempengaruhi keberlanjutan sumber daya wilayah pesisir. Memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat, terutama agama dan adat istiadat masyarakat setempat serta aturan – aturan yang telah ada (kearifan lokal). Pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir dalam dimensi ekonomi perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Keadilan sosial;
- b. Pemberdayaan masyarakat;

- c. Pemberdayaan kelembagaan;
- d. Pelibatan masyarakat (*stakeholder*);
- e. Memperhatikan nilai budaya local.

4) Dimensi Tata Kelola

Segenap keterpaduan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan akan berhasil diterapkan apabila ditunjang oleh keterpaduan dari pelaku dan pengelola pembangunan wilayah pesisir. Pelaku pembangunan dan pengelolaan sumber daya pesisir terdiri dari pemerintah, swasta, masyarakat yang masing – masing memiliki kepentingan terhadap pemanfaatan sumber daya pesisir. Penyusunan perencanaan pengelolaan terpadu harus mampu mengakomodasi segenap kepentingan pelaku pembangunan pesisir. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir dalam dimensi ekonomi perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Partisipasi;
- b. Kepastian hukum;
- c. Transparansi;
- d. Efektifitas dan efisiensi;
- e. Akuntabilitas

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dalam perspektif *sustainable development* melaksanakan kegiatan yang menunjang empat dimensi keberlanjutan, yaitu dimensi ekonomi, ekologi, sosial, dan politik (Hadi, 2006). Dalam perkembangan penelitian yang berjudul “Dinamika Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Kabupaten Rembang” oleh Kismartini

(2014), menunjukkan bahwa dimensi politik sangat mewarnai kegiatan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir.

Berdasarkan berbagai uraian penjelasan mengenai prinsip pembangunan berkelanjutan dapat diketahui bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan proses perubahan menuju kondisi yang lebih baik melalui pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki secara bijak untuk memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Sehingga secara garis besar pelaksanaan pembangunan hendaknya memperhatikan 4 (empat) dimensi dasar pembangunan berkelanjutan yaitu: (1) Dimensi ekonomi dalam rangka peningkatan dan pertumbuhan ekonomi; (2) Dimensi sosial; (3) Dimensi ekologi atau lingkungan; dan (4) Dimensi tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

1.5.6.1. Evaluasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak (Winarno, 2012: 229). Kegiatan evaluasi kebijakan dapat dilaksanakan ketika suatu kebijakan telah berjalan kurang lebih 5 tahun semenjak kebijakan tersebut diimplementasikan, untuk dapat mengetahui *outcome* serta dampak suatu kebijakan. Apabila suatu kebijakan semakin strategis maka diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang dalam melakukan evaluasi kebijakan. Sebaliknya, jika suatu kebijakan bersifat lebih teknis,

maka kegiatan evaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan kurun waktu yang lebih cepat semenjak kebijakan tersebut diimplementasikan.

Subarsono (2013: 120 – 121) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan, sehingga melalui evaluasi kebijakan dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- 2) Mengukur atau menilai tingkat suatu kebijakan. Dengan adanya evaluasi kebijakan dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- 3) Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan, sehingga dapat diketahui ukuran dan kualitas pengeluaran atau *output* dari suatu kebijakan.
- 4) Mengukur dampak suatu kebijakan. Melalui evaluasi kebijakan dapat diketahui dampak dari adanya kebijakan, baik dampak positif maupun dampak negatif.
- 5) Mengidentifikasi adanya penyimpangan kebijakan melalui perbandingan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- 6) Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Evaluasi kebijakan tidak hanya dipandang sebagai tahap akhir suatu program kebijakan, melainkan mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan

dalam proses kebijakan. Setiap proses dalam kegiatan evaluasi kebijakan saling berkesinambungan dan menunjukkan skala nilai terhadap hasil kebijakan dan suatu program. James Anderson dalam (Winarno, 2014: 220 – 233) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing – masing tipe didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi. Ketiga tipe evaluasi kebijakan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Tipe pertama

Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan fungsional yang dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan yang dilaksanakan.

2) Tipe kedua

Evaluasi kebijakan difokuskan pada kinerja kebijakan atau program – program tertentu, yaitu mengenai tingkat kejujuran dan efisiensi dalam pelaksanaan program.

3) Tipe ketiga

Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang sistematis dengan melihat secara objektif mengenai program – program kebijakan yang dijalankan. Hal tersebut bertujuan untuk mengukur dampak dari suatu kebijakan bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan dari suatu kebijakan tercapai.

Tipe evaluasi kebijakan yang sesuai dengan penelitian pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok dalam perspektif pembangunan berkelanjutan adalah tipe ketiga, dimana peneliti bertujuan

menganalisis sejauh mana pelaksanaan program kebijakan pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok dengan melihat tingkat keselarasan pelaksanaan program kebijakan dengan tujuan program yang sebelumnya telah dirumuskan. Sedangkan pendekatan evaluasi yang akan digunakan oleh peneliti adalah pendekatan evaluasi proses, dimana tujuan dari evaluasi kebijakan program pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok adalah untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil – hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai *stakeholders*.

Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan suatu kebijakan. Sehingga untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau tingkat kegagalan suatu kebijakan dibutuhkan adanya indikator penilaian. Dunn (Subarsono, 2012: 126) menjelaskan terdapat lima indikator penilaian yang dapat digunakan dalam evaluasi kebijakan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.4

Indicator evaluasi kebijakan William Dunn

No	Kriteria	Penjelasan
1.	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
2.	Efisien	Seberapa banyak upaya yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3.	Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
4.	Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?

5.	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
6.	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar – benar berguna atau bernilai?

Sumber: Dunn (Subarsono, 2012:126)

1) Efektivitas

Tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Dunn, 2012: 127). Apabila setelah pelaksanaan program kebijakan tidak adanya dampak yang mampu memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan telah gagal, tetapi adakalanya suatu program kebijakan tidak terlihat hasilnya dalam jangka pendek, sehingga diperlukannya proses yang lebih lama. Sehingga efektivitas merupakan standar yang menunjukkan sejauh mana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi – fungsinya secara optimal.

Dalam program pembangunan berkelanjutan Kampung Bahari Tambaklorok terdapat empat fokus utama pembangunan yaitu keberlanjutan secara ekonomi, keberlanjutan secara sosial, keberlanjutan secara ekologi, dan keberlanjutan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sehingga evaluasi kegiatan yang dilakukan dapat melihat indikator efektivitas dari fokus atau tujuan utama pembangunan tersebut.

2) Efisiensi

Berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan efektivitas tertentu (Dunn, 2012: 127). Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu program kebijakan ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibanding dengan hasil yang dicapai, maka program kebijakan tersebut telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

Tingkat efisiensi dalam pembangunan berkelanjutan Kampung Bahari Tambaklorok dapat dilihat dari indikator alokasi sumber daya dan sumber dana yang dikeluarkan dalam program pembangunan, dan tingkat daya guna hasil pembangunan dalam mengatasi permasalahan yang ada.

3) Kecukupan

Diartikan sebagai tujuan yang telah dicapai telah berdampak pada sasaran kegiatan (Dunn, 2012, 128). Kecukupan berkaitan dengan tingkat kepuasan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang dapat memecahkan permasalahan.

Latar belakang pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok adalah dikarenakan permasalahan pesisir Tambaklorok yang begitu kompleks, yaitu permasalahan kemiskinan, permukiman kumuh, dan daerah rawan bencana alam. Ketiga permasalahan tersebut dapat dijadikan sebagai penilaian dalam indikator kecukupan, apakah pembangunan berkelanjutan

Kampung Bahari Tambaklorok telah dapat mengatasi permasalahan tersebut.

4) Pemerataan

Diartikan sebagai tingkat keadilan yang diberikan dan diperoleh dari sasaran kebijakan (Dunn, 2012: 128). Pemerataan berkaitan erat dengan rasionalitas legal dan sosial yang menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok – kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Dalam pembangunan berkelanjutan Kampung Bahari Tambaklorok indikator pemerataan ini dapat dianalisis melalui implementasi dimensi keberlanjutan sosial.

5) Responsivitas

Dunn (2012: 129) mengungkapkan bahwa responsivitas dalam kebijakan public merupakan respon dari suatu aktivitas, yang berarti tanggapan sasaran kebijakan public atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas dalam program kebijakan pembangunan berkelanjutan Kampung Bahari Tambaklorok dapat diketahui melalui keterjangkauan kebijakan terhadap kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok – kelompok masyarakat. Keberhasilan dapat diketahui melalui tanggapan masyarakat sebelum pelaksanaan kebijakan atau dalam sosialisasi perencanaan kebijakan dan tanggapan masyarakat setelah dampak program kebijakan sudah dapat dirasakan dalam bentuk dukungan ataupun penolakan.

Indikator responsivitas merupakan cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, kecukupan, dan pemerataan.

6) Ketepatan

Indikator evaluasi kebijakan yang merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan – tujuan tersebut (Dunn, 2012: 130). Dalam pembangunan berkelanjutan Kampung Bahari Tambaklorok dapat menggunakan kriteria untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Evaluasi kebijakan yang dilakukan dalam program pembangunan berkelanjutan Kampung Bahari Tambaklorok bertujuan untuk menilai dan menganalisis mengenai program kebijakan pembangunan apakah program tersebut berdampak terhadap permasalahan yang dihadapi. Diketahui bahwa wilayah pesisir Tambaklorok memiliki permasalahan yang kompleks, sehingga kebijakan pembangunan Kampung Bahari yang dikemas dalam program pembangunan berkelanjutan hadir sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Akan tetapi terdapat dampak yang ditimbulkan dari adanya program kebijakan pembangunan berkelanjutan Kampung Bahari

Tambaklorok seperti permasalahan sosial politik, ekonomi, dan ekologi. Sehingga diperlukannya evaluasi terhadap program kebijakan pembangunan untuk mengetahui dampak apa saja yang terjadi setelah program pembangunan dilaksanakan.

1.5.7. Wilayah Pesisir

Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection (GESAMP) mendefinisikan wilayah pesisir sebagai wilayah daratan dan perairan yang dipengaruhi oleh proses biologis dan fisik dari perairan laut maupun dari daratan, dan didefinisikan secara luas untuk kepentingan pengelolaan sumber daya alam. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil menjelaskan bahwa wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Pesisir merupakan perbatasan antara daratan dan lautan umumnya merupakan suatu garis yang tidak didefinisikan secara jelas pada sebuah peta, namun hal tersebut terjadi sebagai suatu wilayah transisi bertahap, atau dikenal dengan zona pesisir. Apabila ditinjau dari garis pantai (*coastline*), wilayah pesisir memiliki dua macam zona yaitu, zona yang sejajar garis pantai dan zona yang tegak lurus terhadap garis pantai. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ke arah darat pada umumnya adalah jarak secara arbitrer dari rata – rata pasang tinggi (*mean high tide*), dan batas ke arah laut umumnya adalah sesuai dengan batas yuridiksi provinsi yang bersangkutan.
- b. Untuk kepentingan pengelolaan, batas arah darat dari suatu wilayah pesisir dapat ditetapkan dua macam, yaitu batas wilayah untuk perencanaan (*planning zone*) dan batas untuk pengaturan (*regulation zone*) atau pengelolaan keseharian (*day – to – day management*). Untuk wilayah perencanaan sebaiknya meliputi seluruh daerah daratan atau hulu, apabila terdapat kegiatan manusia (pembangunan) yang dapat menimbulkan dampak secara nyata atau signifikan terhadap lingkungan dan sumberdaya di wilayah pesisir. Jika suatu program pengelolaan wilayah pesisir menetapkan dua batasan wilayah pengelolaannya (wilayah perencanaan dan wilayah pengaturan), maka wilayah perencanaan selalu lebih luas daripada wilayah pengaturan. Dalam pengelolaan wilayah sehari – hari, pemerintah (pihak pengelola) memiliki kewenangan penuh untuk mengeluarkan penolakan izin kegiatan pembangunan.
- c. Bahwa batas ke arah darat dari suatu wilayah pesisir dapat berubah, tergantung dengan isu pengelolaannya.

Wilayah pesisir merupakan kawasan yang sangat potensial. Dahuri (dalam Kismartini dan Bungin, 2019: 155) merinci bahwa dalam suatu wilayah pesisir dan lautan terdapat satu atau lebih lingkungan ekosistem dan sumber daya. Ekosistem ini dapat bersifat alami maupun buatan. Ekosistem alami yang

terdapat di wilayah pesisir dan lautan antara lain: terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, pantai berpasir, formasi *pes – caprae*, formasi *barringtonia*, estuaria, laguna, dan delta. Adapun ekosistem buatan antara lain: tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan agro – industri, dan kawasan permukiman. Sehingga dapat diketahui bahwa wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan yang kaya akan sumber daya alam.

Selain memiliki berbagai sumber daya alam yang sangat potensial, wilayah pesisir juga memiliki berbagai permasalahan yang sangat kompleks, seperti masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir, tingginya kerusakan sumber daya alam pesisir, rendahnya kemandirian organisasi sosial desa dan lunturnya nilai – nilai budaya masyarakat, serta rendahnya infrastruktur desa dan kesehatan lingkungan permukiman.

Daerah pesisir masih memiliki berbagai permasalahan yang kompleks karena sistem pengelolaan sumber daya serta sistem pembangunan daerah pesisir belum dilaksanakan secara bijak. Kismartini dan Bungin (2019) menjelaskan bahwa karakteristik pembangunan kawasan pesisir Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan pada umumnya bersifat ekstraktif, tidak berkelanjutan dan hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk.

- 2) Menciptakan ekonomi dualistic kesenjangan yang menganga antara kelompok pengusaha kecil (tradisional) dengan kelompok usaha besar (komersial).
- 3) Kawasan pesisir sebagai sebagai keranjang sampah dari berbagai jenis limbah dan sedimen yang berasal dari kegiatan di darat.
- 4) Konflik egoisme sektoral, dimana sektoral, dimana sektor – sektor yang dapat menghasilkan *cash money* jangka pendek dan tidak memerlukan lingkungan yang tinggi.
- 5) Ketidakseimbangan tingkat pemanfaatan dan kerusakan lingkungan antarwilayah.

Sehingga agar sumber daya wilayah pesisir tetap terjaga dengan baik perlunya diterapkan sistem pengelolaan atau pembangunan wilayah pesisir dengan bijak, dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, tidak mengejar keuntungan jangka pendek, serta bersifat demokratis untuk kesejahteraan masyarakat pesisir.

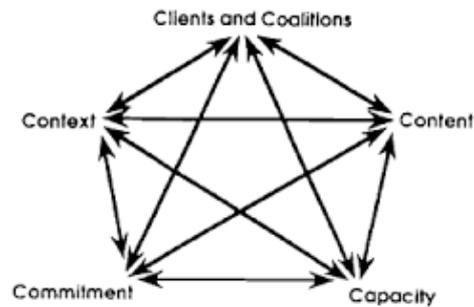
1.5.7.1. Kendala Pelaksanaan Program Pembangunan Kawasan

Pesisir

Najam (dalam Kismartini dan Bungin, 2019) melakukan analisis implementasi kebijakan publik yang sifatnya kompleks pada negara – negara yang sedang berkembang, hasilnya adalah dapat diidentifikasi adanya lima variabel kritis yang disebutnya sebagai 5C Protokol, yang dapat melemahkan tetapi juga dapat menguatkan kinerja implementasi kebijakan

Gambar 1.4

5C Protokol Najam (1995)



Sumber: Najam (dalam Kismartini dan Bungin, 2019)

5C Protocol Najam dijelaskan sebagai berikut:

1) *The content of policy*

Berkaitan dengan isi kebijakan yang ditetapkan untuk dilakukan (yaitu goals), bagaimana isu permasalahan (yaitu teori kausal), bagaimana mencapai tujuan untuk memecahkan masalah yang dirasakan.

2) *The nature of the institutional context – the corridor*

Berkaitan dengan sifat kelembagaan konteks – koridor (sering disusun sebagai prosedur operasional) melalui mana kebijakan harus dijalankan, dan oleh siapa proses implementasi dilakukan

3) *Commitment*

Merupakan komitmen dari mereka yang dipercaya melaksanakan implementasi di berbagai tingkat ke tujuan, teori kausal, dan metode kebijakan.

4) *Capacity*

Kepastian administratif dari pelaksana untuk melaksanakan perubahan yang diinginkan mereka

5) *Client and coalitions*

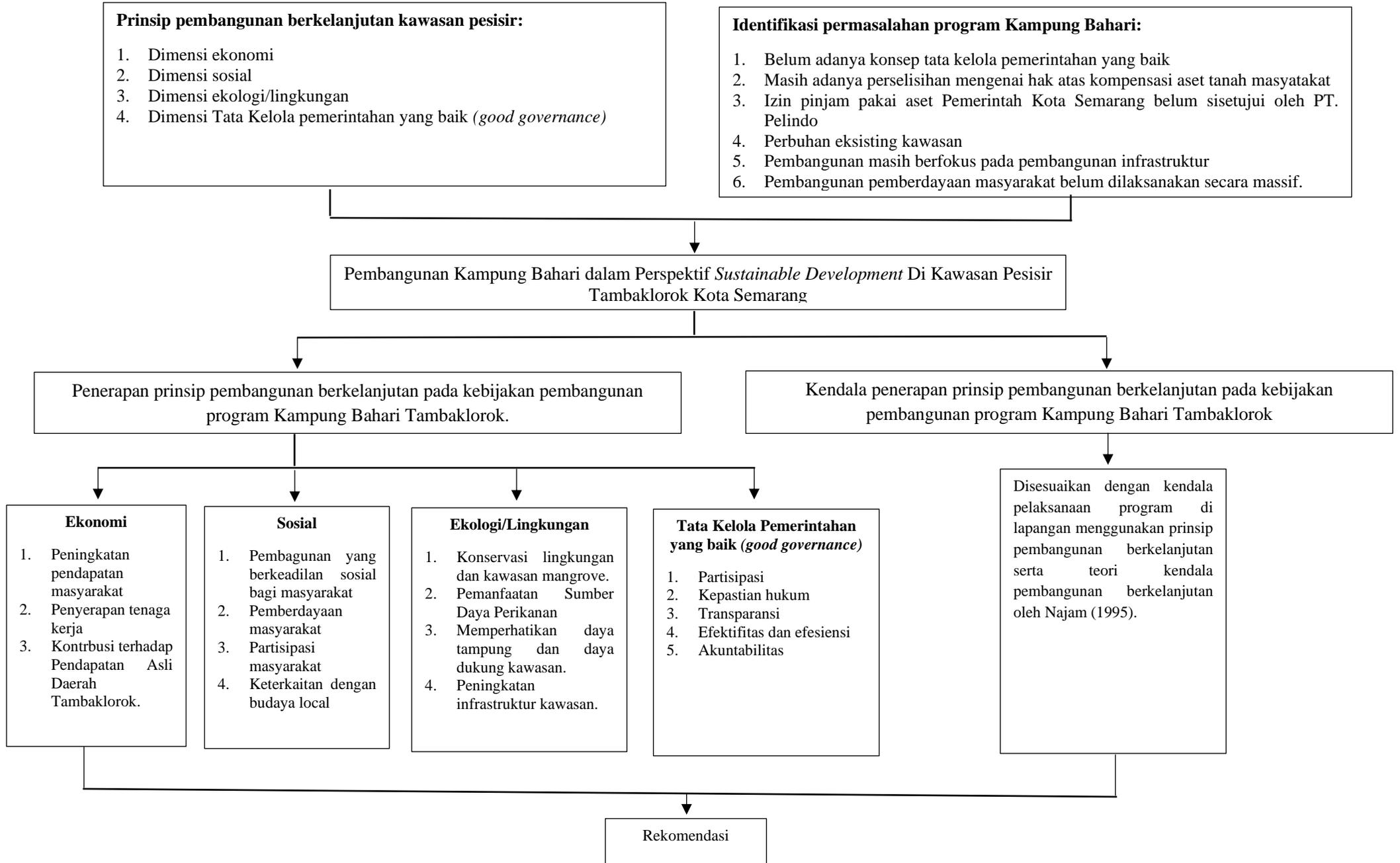
Dukungan dari klien dan koalisi yang kepentingannya ditingkatkan atau terancam oleh kebijakan dan strategi mereka dalam memperkuat atau membelokkan implementasi.

Lima variabel kritis tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain, misalnya lemahnya prosedur operasional akan berpengaruh terhadap kapasitas administrasi karena ketidakjelasan siapa dan bagaimana harus dilakukannya implementasi, hal ini juga dapat melemahkan dukungan klien atau koalisi karena faktor ketidakpercayaan. Sehingga jika menginginkan peningkatan kinerja implementasi kebijakan perlu secara simultan memperhatikan aspek – aspek yang terkait dari lima variabel tersebut.

Muhammad Dio Fabianto dan Pieter Th Berhito (2014) dalam jurnal yang berjudul “Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat” menjelaskan bahwa terdapat beberapa kendala pada implementasi atau pelaksanaan pembangunan kawasan pesisir yaitu:

- 1) Pemanfaatan dan pengelolaan daerah belum diatur dengan peraturan perundang – undangan yang jelas, sehingga daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan suatu kebijakan.
- 2) Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir cenderung bersifat sektoral, sehingga kadangkala melahirkan kebijakan yang tumpang tindih satu sama lain.
- 3) Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir belum memperhatikan konsep daerah pesisir sebagai suatu kesatuan ekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif pemerintahan, sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antar daerah
- 4) Kewenangan daerah dalam rangka otonomi daerah belum dipahami secara komprehensif oleh para stakeholders, sehingga pada setiap daerah dan setiap sector timbul berbagai pemahaman dan penafsiran yang berbeda dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir.

Berdasarkan teori mengenai kendala yang telah dijelaskan, diketahui bahwa kebijakan pembangunan atau pengelolaan pesisir memang tidak mudah dilakukan, dikarenakan kawasan pesisir merupakan kawasan dengan kompleksitas yang tinggi, sehingga dibutuhkannya regulasi yang pasti (*blue print*) mengenai kebijakan pembangunan pesisir serta kolaborasi dan koordinasi pemerintah hingga masyarakat.



1.6. Operasionalisasi Konsep

Secara umum pembangunan merupakan proses perubahan yang terencana dan terstruktur menuju kondisi yang lebih baik. Proses perubahan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada peningkatan serta pertumbuhan perekonomian saja, tetapi juga perlunya keseimbangan pada aspek sosial, serta lingkungan. Sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan, bahwa pembangunan dilakukan dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana, efisien, dan memperhatikan keberlangsungan pemanfaatannya baik untuk generasi masa kini maupun generasi yang akan datang. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan kawasan pesisir tidak hanya berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*) saja, tetapi juga dilaksanakan sesuai dengan kaidah pembangunan yang berkelanjutan.

Penelitian mengenai pembangunan kawasan pesisir Tambaklorok menjadi Kampung Bahari ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam program Pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok, serta menganalisis berbagai faktor yang menjadi kendala selama proses pembangunan. Operasionalisasi konsep yang dapat digunakan untuk menganalisis program pembangunan berkelanjutan di Kampung Bahari Tambaklorok, Kota Semarang adalah:

1) Prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) pada kebijakan pembangunan program Kampung Bahari Tambaklorok

a. Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi pada kebijakan pembangunan program Kampung Bahari Tambaklorok adalah, berkaitan dengan kondisi perekonomian wilayah akibat adanya pembangunan. Pelaksanaan pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan perekonomian, tetapi juga perlu memperhatikan daya dukung perekonomian sumber daya yang dimiliki oleh kawasan pesisir Tambaklorok untuk menjamin kelangsungan produktivitas perekonomiannya. Pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok juga harus mendorong peningkatan kualitas kehidupan perekonomian masyarakat. Indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis keterkaitan dimensi ekonomi dengan pembangunan berkelanjutan yaitu:

1. Peningkatan pendapatan masyarakat pesisir Tambaklorok.
2. Penyerapan tenaga kerja masyarakat pesisir Tambaklorok.
3. Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah pesisir Tambaklorok.

b. Dimensi Sosial

Dimensi sosial pada kebijakan pembangunan program Kampung Bahari Tambaklorok adalah, berkaitan dengan tata Kelola kehidupan sosial masyarakat Tambaklorok akibat adanya pembangunan Kampung Bahari. Pelaksanaan pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok perlu memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat pesisir Tambaklorok

seperti agama dan adat istiadat, dan kearifan lokal. Indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis keterkaitan dimensi sosial dengan pembangunan berkelanjutan yaitu:

1. Keadilan sosial masyarakat kawasan pesisir Tambaklorok.
2. Pemberdayaan masyarakat kawasan pesisir Tambaklorok.
3. Partisipasi masyarakat kawasan pesisir Tambaklorok.
4. Keterkaitan dengan budaya lokal masyarakat pesisir Tambaklorok.

c. Dimensi Ekologi/Lingkungan

Dimensi ekologi atau lingkungan pada kebijakan pembangunan program Kampung Bahari Tambaklorok adalah, berkaitan dengan daya dukung serta daya tampung lingkungan yang dimiliki kawasan pesisir Tambaklorok. Pembangunan Kampung Bahari dilakukan dengan tidak mengeksploitasi sumber daya yang dimiliki kawasan pesisir Tambaklorok. Indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis keterkaitan dimensi ekologi dengan pembangunan berkelanjutan yaitu:

1. Usaha konservasi lingkungan dan kawasan mangrove.
2. Pemanfaatan sumber daya perikanan secara bijak
3. Memperhatikan daya tampung dan daya dukung kawasan pesisir Tambaklorok.
4. Peningkatan infrastruktur kawasan pesisir Tambaklorok.

d. Dimensi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*)

Dimensi *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik pada kebijakan pembangunan program Kampung Bahari Tambaklorok adalah, berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program hingga implementasi, adanya kerjasama dari pemerintah sehingga program pembangunan dilaksanakan dengan konsep *bottom up* (bawah atas) dengan mendengarkan pendapat masyarakat, tidak dengan menggunakan konsep *top down* (atas bawah) dimana keterlibatan masyarakat sangat minim dalam proses perencanaan program pembangunan. Indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis keterkaitan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan pembangunan berkelanjutan yaitu:

1. Partisipasi
2. Kepastian hukum
3. Transparansi
4. Efektifitas dan efisiensi
5. Akuntabilitas

2) Kendala penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) pada kebijakan pembangunan program Kampung Bahari Tambaklorok

Hambatan atau kendala merupakan segala sesuatu yang dapat menghalangi atau menghambat pelaksanaan kegiatan atau aktivitas sehingga tidak terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok dianggap belum dapat memenuhi prinsip

pembangunan berkelanjutan, sehingga perlu dianalisis kendala atau hambatan yang menyebabkan pembangunan tersebut tidak terlaksana sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kendala pada penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dapat dianalisis dari kendala pelaksanaan program di lapangan menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan (ekonomi, sosial, ekologi, serta tata kelola).

Tabel 1.5
Fenomena Penelitian

Tujuan	Fenomena	Gejala
Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan atau <i>sustainable development</i> dalam kebijakan pembangunan program Kampung Bahari Tambaklorok.	Dimensi Ekonomi	Kebijakan pembangunan program Kampung Bahari dapat memberikan dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi kawasan pesisir Tambaklorok.
	Dimensi Sosial	Kebijakan pembangunan program Kampung Bahari

		<p>berkaitan dengan program pembangunan yang berkeadilan sosial bagi masyarakat, pembangunan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat, berkaitan dengan partisipasi masyarakat serta kebudayaan local yang dimiliki oleh masyarakat pesisir Tambaklorok.</p>
	<p>Dimensi Ekologi/Lingkungan</p>	<p>Kebijakan pembangunan program Kampung Bahari perlu memperhatikan upaya konservasi lingkungan dan kawasan mangrove, pemanfaatan sumber daya perikanan, memperhatikan daya tampung dan daya dukung kawasan serta adanya</p>

		upaya peningkatan infrastruktur kawasan pesisir Tambaklorok.
	Dimensi Tata Kelola	Berbagai aktor terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan pembangunan program Kampung Bahari, sehingga diperlukannya analisis mengenai partisipasi pemerintah hingga masyarakat, adanya asas kepastian hukum pada pelaksanaan program, transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta kuntabilitas pada proses pelaksanaan program pembangunan.
Kendala dalam penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan atau <i>sustainable development</i> pada	- Disesuaikan dengan kendala pelaksanaan program di	Berkaitan dengan isi kebijakan yang ditetapkan untuk dilakukan, sifat kelembagaan konteks –

kebijakan pembangunan program Kampung Bahari Tambaklorok	lapangan menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan - Analisis kendala melalui 5C Protokol Najam (1995)	koridor, komitmen dari aktor yang terlibat, kepastian administratif dari pelaksana untuk melaksanakan perubahan, dukungan atau partisipasi dari masyarakat selaku salah satu subjek pembangunan.
---	--	--

Sumber: Diolah dari subbab operasionalisasi konsep

1.7. Argumen Penelitian

Kawasan pesisir Tambaklorok merupakan kawasan pesisir yang terletak di Kota Semarang tepatnya di kelurahan Tanjung Mas. Kawasan pesisir Tambaklorok merupakan kawasan pesisir yang sangat strategis karena lokasinya dekat dengan daerah industri dan juga dekat dengan Pelabuhan nasional Tanjung Mas. Akan tetapi kawasan pesisir Tambaklorok termasuk kawasan pesisir yang kumuh dan miskin. Berdasarkan berbagai kajian literatur yang telah penulis pelajari, hal tersebut dikarenakan karena masyarakat kawasan pesisir Tambaklorok sebagai aset sumber daya manusia yang bertugas mengelola sumber daya alam yang dimiliki kawasan pesisir Tambaklorok masih sangat minim, dikarenakan mayoritas masyarakat kawasan pesisir Tambaklorok hanya menempuh pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama. Selain itu, infrastruktur yang dimiliki kawasan pesisir Tambaklorok pun masih minim, seperti system sanitasi dan MCK yang masih

belum tertata, belum berfungsinya secara massif tanggul pencegah rob, serta manajemen pembuangan dan pengelolaan sampah yang belum dilakukan dengan baik. Sehingga dibutuhkan suatu upaya pembangunan yang dapat mengubah kawasan pesisir Tambaklorok menjadi lebih baik. Pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada aspek pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan prinsip pembangunan yang dilakukan dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana, efisien, dan memperhatikan keberlangsungan pemanfaatannya baik untuk generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

Pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok merupakan suatu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang untuk menata kawasan pesisir Tambaklorok menjadi kawasan pesisir tangguh yang mampu mengelola berbagai potensi yang dimiliki. Pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai potensi yang dimiliki, serta pembangunan dilakukan dengan memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat membawa perbaikan bagi lingkungan melalui usaha konservasi sumber daya alam yang dimiliki seperti ikan dan terumbu karang, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat yang dapat mendorong tingkat perekonomian masyarakat, pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung kegiatan perekonomian kawasan pesisir Tambaklorok sebagai Kampung Bahari.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian cara atau kegiatan yang digunakan untuk mendapatkan data demi kegunaan penelitian dengan didasarkan pada asumsi – asumsi dasar, pandangan filosofis dan ideologis, serta pertanyaan mengenai isu – isu yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk meneliti mengenai pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok dalam perspektif pembangunan berkelanjutan adalah metode penelitian kualitatif. Sugiyono (2009) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan desain penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, serta tindakan yang dilakukan secara holistic. Hasil dari penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan realitas kontekstual dengan mengungkapkan masalah atau keadaan sebagaimana adanya, sehingga menghasilkan suatu fakta.

1.8.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian mengacu pada pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan penulis untuk meneliti mengenai pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok dalam perspektif pembangunan berkelanjutan adalah tipe penelitian yang bersifat deskriptif karena penulis bertujuan untuk merepresentasikan penelitian melalui penjelasan dalam bentuk kata – kata dan bahasa tentang fenomena sosial dari permasalahan yang diteliti.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat atau lokus pelaksanaan penelitian, dimana peneliti mendapatkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Peneliti menentukan lokasi penelitian di kawasan pesisir Tambaklorok, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian di kantor pemerintahan Kota Semarang yang berperan dalam program Pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu atau kelompok yang mampu memberikan informasi terkait dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti melalui wawancara. Dalam metode penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan.

Pemilihan informan dalam penelitian program pembangunan berkelanjutan Kampung Bahari Tambaklorok menggunakan Teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan informan berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tertentu, seperti tingkat pengetahuan informan terhadap program pembangunan berkelanjutan Kampung Bahari Tambaklorok. Informan yang dipilih harus merupakan informan yang jujur dan dapat dipercaya serta yang benar – benar memahami terkait dengan perihal program pembangunan berkelanjutan Kampung Bahari Tambaklorok.

Subjek penelitian yang akan dipilih sebagai informan dalam program pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok Kota Semarang dalam perspektif pembangunan berkelanjutan yaitu:

- 1) Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Semarang
- 2) Kepala Bidang Pertanahan, Dinas Tata Ruang (DISTARU) Kota Semarang
- 3) Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang, Dinas Penataan Ruang (DISTARU) Kota Semarang
- 4) Sub Koordinator Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, Dinas Perikanan Kota Semarang
- 5) Sekretaris Kecamatan Semarang Utara
- 6) Kepala Kelurahan Tanjung Mas
- 7) Kepala Rukun Warga (RW) 12 Tambak Mulyo
- 8) Kepala Rukun Warga (RW) 13 Tambak Mulyo
- 9) Kepala Rukun Warga (RW) 14 Tambak Mulyo
- 10) Kepala Rukun Warga (RW) 15 Tambak Mulyo
- 11) Kepala Rukun Warga (RW) 16 Tambak Rejo

1.8.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif berupa teks atau kata – kata tertulis, serta peristiwa dalam kehidupan sosial. Sehingga jenis data yang digunakan dalam penelitian pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok

dalam perspektif pembangunan berkelanjutan data berupa kalimat – kalimat penjelas, tulisan, maupun pendeskripsian kenyataan – kenyataan yang ada di lapangan atau dengan kata lain jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bentuk deskriptif.

1.8.5. Sumber Data

Penelitian mengenai pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok dalam perspektif pembangunan berkelanjutan menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Data primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti (Sugiyono, 2006: 137). Sumber data primer dalam penelitian pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok diperoleh secara langsung dari subjek penelitian atau informan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data atau informasi kepada pengumpul data (Sugiyono, 2006:13). Maksudnya adalah sumber data diperoleh melalui objek atau melalui dokumen – dokumen, buku, dan artikel pendukung lainnya. Data sekunder dari penelitian ini berupa kajian literatur seperti jurnal atau artikel, buku pedoman yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan kawasan pesisir yang berkelanjutan, *website* atau situs online yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan kawasan pesisir yang berkelanjutan.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang sangat strategis pada tahap penelitian, karena tujuan utama dari suatu penelitian adalah untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2012: 224). Melalui penggunaan teknik pengumpulan data yang tepat, maka akan mendapatkan data yang berkualitas. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara merupakan usaha yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan berbagai pertanyaan kepada informan yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan subjek dalam penelitian, yaitu pemerintah dan juga masyarakat yang terkait dengan program pembangunan berkelanjutan Kampung Bahari Tambaklorok.

2) Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data secara sistematis dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti. Pengamatan secara langsung bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dalam mendalami objek yang diteliti. Peneliti akan melaksanakan observasi atau penelitian langsung di kawasan pesisir Tambaklorok, dimana lokasi pembangunan Kampung Bahari dilaksanakan. Peneliti juga akan melaksanakan observasi secara langsung pada kantor pemerintahan Kota Semarang yang menaungi program pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data – data sekunder dan penelitian kepustakaan terkait kebijakan pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok.

4) Studi Kepustakaan

Merupakan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan jurnal. Studi kepustakaan yang digunakan peneliti seperti artikel, buku, dan jurnal yang berhubungan dengan kebijakan pembangunan kawasan pesisir yang berkelanjutan.

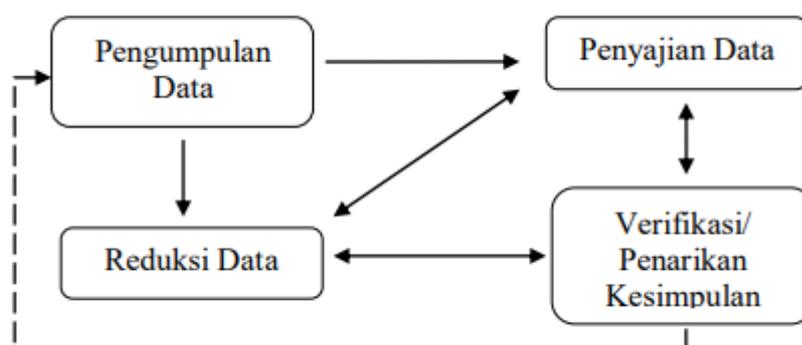
1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data pada penelitian kualitatif merupakan suatu usaha yang berkaitan dengan pengelolaan data, mengorganisasikan, memilah, mengelola, mensitesikan, mencari dan menemukan pola terkait hal – hal penting yang dipelajari. Sugiyono (2012: 244) mendefinisikan analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2012: 247) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Analisis dan interpretasi data kualitatif pada penelitian program pembangunan berkelanjutan Kampung Bahari Tambaklorok sesuai dengan teori Miles dan Huberman meliputi proses *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification*.

Gambar 1.6

Teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman



Sumber: Sugiyono (2012: 247)

- 1) *Data Reduction* (Reduksi Data), merupakan tahap awal dalam analisis data. Reduksi data merupakan proses merangkum, pemilihan poin – pin penting, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan – catatan tertulis selama proses penelitian pada program pembangunan berkelanjutan Kampung Bahari Tambaklorok.
- 2) *Data Display* (Penyajian Data), diartikan sebagai sekumpulan informasi yang perlu disusun yang bertujuan untuk memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan pada penelitian

program pembangunan berkelanjutan Kampung Bahari Tambaklorok.

Proses penyajian data berupa teks naratif, tabel, grafik, atau bagan.

- 3) *Conclusion Drawing/Verification* (Menarik Kesimpulan), merupakan hasil analisis dari program pembangunan berkelanjutan Kampung Bahari Tambaklorok, yang kemudian digunakan sebagai penarikan kesimpulan kemudian guna pengambilan tindakan. Peneliti menarik kesimpulan dari data dan informasi yang telah didapat pada saat di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

1.8.8. Kualitas Data

Kualitas data penelitian kualitatif diuji melalui keabsahannya, agar semua data yang sudah diperoleh di lapangan dapat di deskripsikan, dikategorikan sesuai dengan pandangan yang sama, sehingga peneliti dapat mengecek kembali temuannya melalui perbandingan berbagai sumber, metode atau teori. Penelitian mengenai kebijakan pembangunan berkelanjutan Kampung Bahari Tambaklorok dalam perspektif pembangunan berkelanjutan menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan datanya.

Moleong (2010:330) menjelaskan bahwa teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh. Langkah – langkah yang dapat digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan teknik triangulasi adalah sebagai berikut:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang – orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain;
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Disisi lain, Sugiyono (2008:273) menjelaskan bahwa teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Terdapat tiga teknik yang dapat digunakan untuk menguji keabsahan data dengan Teknik triangulasi, yaitu:

- 1) Triangulasi sumber, merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan pengujian dengan cara pengecekan data yang diperoleh selama penelitian oleh beberapa sumber;
- 2) Triangulasi teknik, merupakan teknik triangulasi dengan melakukan pengujian dengan cara pengecekan data yang sama namun dengan menggunakan alat yang berbeda;
- 3) Triangulasi waktu, merupakan teknik triangulasi yang digunakan dengan mengumpulkan dan melakukan pengecekan dalam waktu atau situasi yang berbeda untuk melihat hasil yang ada.

Pada program pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, untuk menguji keabsahan data penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber. Pengujian keabsahan data dilakukan melalui pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Sehingga peneliti dapat melakukan sinkronisasi dari berbagai informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber penelitian.